

**FAKTOR-FAKTOR KURANGNYA PARTISIPASI MASYARAKAT  
DALAM MENGGUNAKAN HAK PILIH PADA PILKADA TAHUN 2017  
DITINJAU DARI FIQH SIYASAH**

**(STUDI PADA KELURAHAN FAJAR BULAN KECAMATAN WAY  
TENONG KABUPATEN LAMPUNG BARAT)**



Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**ASEP SUPRAYOGI**

**NPM : 1421020166**

Program Studi : Siyasah Syar'iiyyah (Hukum Tata Negara)

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1440 / 2019 M**

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA PARTISIPASI  
MASYARAKAT DALAM MENGGUNAKAN HAK PILIH PADA  
PILKADA TAHUN 2017 DITINJAU DARI FIQH SIYASAH  
(STUDI PADA KELURAHAN FAJAR BULAN KECAMATAN WAY  
TENONG KABUPATEN LAMPUNG BARAT)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**ASEP SUPRAYOGI**

**NPM : 1421020166**

**Program Studi : Siyasa Syar'iyah (Hukum Tata Negara)**

Pembimbing I : Dr. H. Bunyana Sholihin, M. Ag.

Pembimbing II: Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H.,M.M.

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1440/2019 M**

## ABSTRAK

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yakni dengan cara memilih pimpinan negara dan secara aktif atau tidak secara langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah. Namun tidak dapat kita pungkiri, bahwa partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada mengalami pasang surut, hal ini ditandai dengan adanya golongan putih atau biasa disebut dengan golput yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dalam praktiknya masih ada masyarakat Kelurahan Fajar Bulan yang kurang berpartisipasi dan tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan bupati Lampung Barat yaitu sebesar 20% dari jumlah keseluruhan mata pilih yakni kurang lebih sebesar 1.196 jiwa yang terdiri dari jumlah laki-laki dan jumlah perempuan, padahal mereka sudah masuk dalam daftar pemilih tetap, data tersebut penulis peroleh dari PPS ( Panitia Pemungutan Suara) Kelurahan Fajar Bulan.

Rumusan masalah dari penelitian ini yakni faktor apa yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada pilkada tahun 2017 dan Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada pilkada tahun 2017 ditinjau dari fiqh siyasah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada pilkada tahun 2017 serta fiqh siyasah sendiri dalam memandang hal tersebut.

Adapun metode dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). penelitian lapangan dilakukan untuk kancan kehidupan yang sebenarnya. Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat deskriptif (menggambarkan) analisis, yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang telah ada. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah yaitu menggunakan metode Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara dalam pengolahan data penulis melakukan pemeriksaan data, rekonstruksi data, dan sistematis data. Kemudian data-data yang terkumpul diolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan sekaligus dianalisis secara deskriptif kualitatif

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan yaitu, faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat yang berada di Kelurahan Fajar Bulan dalam kegiatan politik khususnya dalam menggunakan hak pilihnya. Adapun faktor-faktor tersebut yaitu faktor ekonomi, dan kesadaran masyarakat sementara partisipasi politik dalam Islam tidak lepas menggunakan prinsip musyawarah dimana di dalam Islam dikenal dengan istilah *syura*. Sikap dan tindakan masyarakat Kelurahan Fajar Bulan yang masih kurang ikut serta dalam pilkada bertentangan dengan perintah Allah atau bertentangan dengan ajaran Islam yang mengharuskan manusia untuk ikut serta dalam pemilihan pemimpin.





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260*

**PERSETUJUAN**

**Nama : Asep Suprayogi**  
**NPM : 1421020166**  
**Jurusan : Siyasah Syar'iiyyah**  
**Fakultas : Syari'ah**  
**Judul Skripsi : Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Hak Pilih Pada Pilkada Tahun 2017 Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Pada Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat)**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag.**  
**NIP.195707051989031001**

**Pembimbing II**

**Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M.**  
**NIP.195703051978031001**

**Ketua Jurusan Siyasah Syar'iiyyah**

**Drs. Susiadi, M.Sos.I**  
**NIP. 197501292000031001**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Faktor-Faktor Kurangnya Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Hak Pilih Pada Pilkada Tahun 2017 Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Pada Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat)”**, disusun oleh Nama: Asep Suprayogi NPM: 1421020166, Program Studi : Siyasah Syar’iyyah (Hukum Tata Negara).

**TIM DEWAN PENGUJI**

Ketua : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.

(.....)

Sekretaris : Arif Fikri., S.H.I., M.Ag.

(.....)

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A.

(.....)

Penguji II : Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag.

(.....)

**Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Raden Intan Lampung**

**Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag**  
**NIP.197009011997031002**





## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا  
يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”(Q.S. An-Nisa ayat. 58).<sup>1</sup>



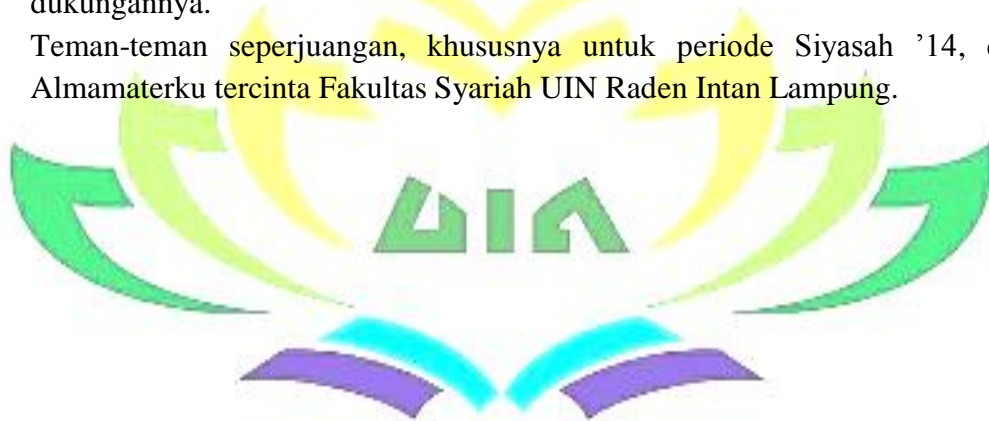
---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Diponegoro, 2006), h. 87.

## PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, sayang dan hormat tak terhingga kepada :

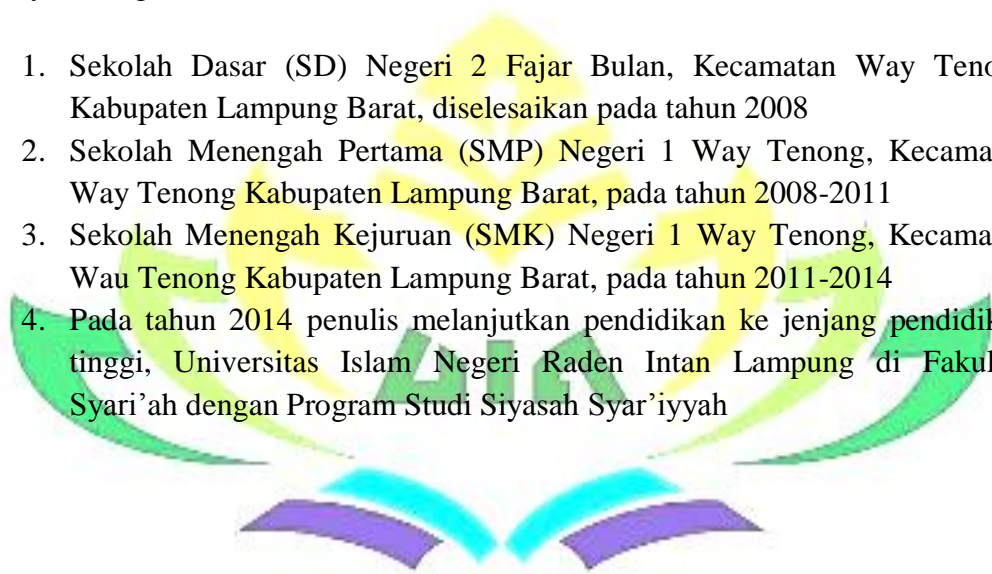
1. Kedua orang tua Ayahanda Sudarwi dan Ibunda Rasmawati yang tiada henti-hentinya dan bosan mendo'akan dan memotivasi saya setiap saat selama menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tanpa meminta balas jasa.
2. Adik kandungku Aang Adi Putra serta saudara keluarga besar abah H. Jumadi dan keluarga besar abah Atu yang selalu memberikan semangat dan dukungannya.
3. Teman-teman seperjuangan, khususnya untuk periode Siyasa '14, dan Almamaterku tercinta Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.



## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Asep Suprayogi dilahirkan pada tanggal 23 September 1995, di Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat. Penulis adalah putra pertama dari dua bersaudara, yang dilahirkan oleh ayahanda yang bernama Sudarwi dan Ibunda Rasmawati dengan riwayat sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Fajar Bulan, Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat, diselesaikan pada tahun 2008
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Way Tenong, Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat, pada tahun 2008-2011
3. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Way Tenong, Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat, pada tahun 2011-2014
4. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syari'ah dengan Program Studi Siyasah Syar'iiyyah





## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul **“Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Hak Pilih Pada Pilkada Tahun 2017 Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Pada Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat)”**. Shalawat dan salam semoga Allah melimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Keluarga, Sahabat dan Umatnya.

Skripsi ini di susun sebagai tugas dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Siyasah Syar’iyyah (Hukum Tata Negara), Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

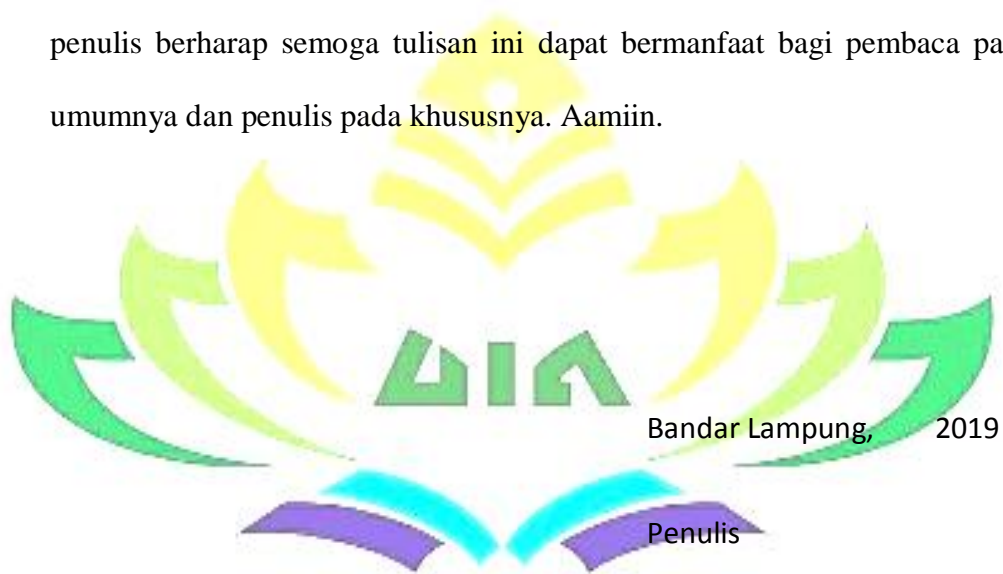
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih seluruhnya kepada :

1. Prof Dr. Moh. Mukri, M, AG., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung

2. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Drs. Susiadi, M.Sos.I., selaku Ketua Jurusan Siyasah Syar'iiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
4. Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag. selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk penyelesaian skripsi ini.
5. Drs. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M. selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis sejak awal perkuliahan dan banyak memotivasi serta meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini .
6. Kepada segenap civitas akademika, dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Kontrakan Squad yang selalu siap siaga membantu dan memberikan dukungan kepada penulis.
8. Sahabat tersayang Ahmaddian Toro, M. Rahadian A, Dede Rachmat, Ghozinun Mas'ud, M. Zafran Naufal Iskandar, Frendy Zevika, Peni Fitri Yanti, Renisa Fitri, Rizqi Maulana, yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
9. Tutut Apridayanti yang selalu memberikan sumbangan pikiran maupun tenaga kepada penulis.

10. Rekan-rekan seperjuangan Jurusan Siyasah angkatan 2014 khususnya kelas C, yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas kebersamaan perjuangan selama ini;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka dan ucapan terimakasih. Namun demikian, penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya. Aamiin.



Asep Suprayogi



## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
F. Metode Penelitian.....	9
 <b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pemilihan Kepala Daerah.....	15
B. Hak Pilih pada Pilkada .....	22
C. Partisipasi Politik .....	29
D. Partisipasi Politik Dalam Islam .....	38
E. Hak Pilih menurut Fiqh Siyash .....	43
 <b>BAB III GAMBARAN UMUM KELURAHAN FAJAR BULAN KECAMATAN WAYTENONG DAN PEMILIHAN BUPATI</b>	
A. Profil Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat .....	57
B. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerahi Kelurahan Fajar Bulan.....	65
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kurangnya Partisipasi Masyarakat Kelurahan Fajar Bulan.....	68
 <b>BAB IV ANALISIS DATA</b>	
A. Faktor Kurangnya Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Hak Pilihnya Pada Pemilihan Bupati Lampung Barat .....	72

B. Kurangnya Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Hak Pilihnya Pada Pemilihan Bupati Lampung Barat Ditinjau Dari Fiqh Siyasah .....	74
--	----

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Untuk memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pemahaman yang dimaksud dan menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca, maka perlu adanya sesuatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung didalam judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah:

**Faktor – Faktor Penyebab Rendahnya Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Hak Pilih Pada Pilkada Tahun 2017 Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Pada Kelurahan FajarBulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat).**

Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk diuraikan yaitu sebagai berikut:

1. Faktor: Hal, keadaan atau peristiwa yang menyebabkan (pengaruh) terjadinya sesuatu.<sup>2</sup>
2. Partisipasi: adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan.<sup>3</sup>

Dengan demikian yang dimaksud partisipasi masyarakat yaitu keikutsertaan masyarakat dalam suatu kegiatan.

---

<sup>2</sup>M. Firdaus Sholihin, Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 50.

<sup>3</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa “Edisi Revisi”* (Jakarta: PT Gramedia, 2008), h.1024.



3. Hak Pilih: adalah hak yang dimiliki dan melekat pada setiap warga negara untuk memilih wakil dalam lembaga perwakilan rakyat yang merupakan salah satu unsur penting dalam sistem pemilihan umum yang demokratis.<sup>4</sup>

4. Pilkada: adalah pemilihan kepada daerah.

Kepala daerah adalah seseorang yang diberikan tugas oleh pemerintah pusat untuk menjalankan pemerintahan di daerah.<sup>5</sup>

Dalam hal ini yang dimaksud dengan pemilihan kepala daerah yaitu pada pemilihan Bupati Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017.

5. Fiqh Siyasah : adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri.<sup>6</sup>

Dari penjelasan-penjelasan istilah diatas dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah : Hal atau peristiwa apa yang menyebabkan kurangnya keikutsertaan masyarakat Kelurahan Fajar Bulan dalam memilih kepala daerah yaitu pada pemilihan Bupati Lampung Barat Tahun 2017 di tinjau dari fiqh siyasah.

---

<sup>4</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2007), h.155.

<sup>5</sup>Haw Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 57.

<sup>6</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam"*(Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), h. 4.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan penulis yang mendorong memilih judul skripsi ini adalah:

1. Peneliti mengangkat judul ini karena di rasa ada faktor yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada pilkada Tahun 2017
2. Peneliti mengangkat judul ini dikarenakan adanya relevansi antara judul dengan program studi penulis, dan lokasi penelitian yang mudah di jangkau.

## **C. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan sebuah Negara demokrasi yang berasal dari bahasa Yunani dengan sebutan *demokratia* artinya pemerintahan (*kratia*) oleh rakyat (*demos*). Ada juga yang mengatakan bahwa demokrasi sebenarnya berasal dari Timur seperti dikatakan oleh *John Keane* yang mengatakan meski saat ini demokrasi sering berasal dari dunia Barat, dalam penelusuran sejarah demokrasi ternyata berasal dari dunia Timur. Hal ini dapat dibuktikan misalnya Indonesia adanya pemilihan langsung kepala desa dan Marga di Sumatera yang telah berlangsung sekian lama. Dalam perjalanan sejarah demokrasi yang pada awalnya ditolak karena elitis, kemudian berproses dengan legitimasi moral dan nilai keagamaan sampai demokrasi kontemporer yang lebih baik dengan melibatkan partisipasi luar

masyarakat.<sup>7</sup>Partisipasi masyarakat pada akhirnya menempatkan kekuasaan tertinggi yang sesungguhnya berada ditangan rakyat. Kekuasaan itu harus berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bahkan kekuasaan hendaklah diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat.<sup>8</sup> Untuk dapat menjalankan pemerintahannya, Negara Indonesia di pimpin oleh seorang presiden dan dibantu oleh seorang wakil presiden.

Untuk menjalankan pemerintahan khususnya didaerah-daerah yang ada di Indonesia maka diperlukannya juga pemimpin daerah yang dapat menyalurkan suara atau aspirasi masyarakat yang ada didaerah, oleh karena itu maka dibentuklah pemimpin daerah yang diantaranya adalah gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, dan walikota dan wakil walikota untuk kota.

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>9</sup>

Pemerintahan daerah kabupaten/kota merupakan satuan unit pemerintahan Negara yang langsung berhubungan dengan fungsi pengayoman dan pelayanan pemerintahan Negara terhadap rakyat, untuk itu setiap satuan pemerintahan dilengkapi dengan perangkat administrasi

---

<sup>7</sup>Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*(Yogyakarta: Teras, 2001), h.203-204.

<sup>8</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Kostitusionalisme Indonesia*(Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 58.

<sup>9</sup>Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (2).



ditingkat kecamatan yang dipimpin oleh seorang camat sebagai pejabat administrasi yang terendah kepala desa dan lurah.<sup>10</sup>

Dalam proses pengangkatan pemimpin tersebut pemerintah pusat melaksanakan pemilihan langsung yang dilakukan oleh rakyat dalam satu daerah atau yang lebih dikenal dengan pilkada. Pemilihan kepala daerah atau pilkada ini dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang sudah memenuhi syarat untuk memilih. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket dengan wakil kepala daerah yang akan mendampingi kepala daerah dalam menjalankan tugasnya. Pilkada tersebut bertujuan rakyat bisa ikut serta berpartisipasi dalam pesta demokrasi untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin di daerahnya.

Kepala daerah atau pemimpin artinya seseorang yang diberikan tugas oleh pemerintah pusat untuk menjalankan pemerintahan di daerah. Dalam fiqh siyasah kepala daerah dikenal dengan istilah *Imamah* menurut bahasa artinya “kepemimpinan”. Imam artinya pemimpin, seperti ketua atau yang lainnya, baik dia memberikan petunjuk atau menyesatkan. Imam juga disebut khalifah, yaitu penguasa dan pemimpin tertinggi rakyat. Kata imam juga digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya.<sup>11</sup>

Dalam sejarah Islam mengenai kepemimpinan, Imam atau Imamah pada masa Rasulullah SAW. Beliau tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikannya sebagai pemimpin politik umat Islam setelah

---

<sup>10</sup>Imam Mahdi, *Op. Cit.*, h.182.

<sup>11</sup>Ali As-Salus, *Imamah & Khilafah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997),h.15.

beliau wafat. Beliau nampaknya menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum muslimin sendiri untuk menentukannya. Karena itulah, tidak lama setelah beliau wafat belum lagi jenazahnya dimakamkan, sejumlah tokoh muhajirin dan anshar berkumpul dibalai kota Bani Sa'idah, Madinah. Mereka memusyawarahkan siapa yang akan dipilih menjadi pemimpin. Musyawarah itu berjalan cukup alot karena masing-masing pihak, baik Muhajirin maupun Anshar, sama-sama merasa berhak menjadi pemimpin umat Islam. Namun dengan semangat ukhuwah Islamiah yang tinggi akhirnya, Abu Bakar terpilih. Rupanya semangat keagamaan Abu Bakar mendapat penghargaan yang tinggi dari umat Islam, sehingga masing-masing pihak menerima dan memba'iatnya.<sup>12</sup>

Musyawarah dalam menentukan seorang pemimpin di Indonesia dikenal dengan istilah keikutsertaan atau partisipasi politik yang artinya kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yakni dengan cara memilih pimpinan Negara dan secara atau tidak secara langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah.<sup>13</sup> Namun tidak dapat kita pungkiri, bahwa partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada mengalami pasang surut, hal ini ditandai dengan adanya golongan putih atau biasa disebut dengan golput yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Kelurahan Fajar Bulan adalah salah satu kelurahan yang berada di Kabupaten Lampung Barat. Kelurahan Fajar Bulan juga merupakan salah satu

---

<sup>12</sup>Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada,1997), h. 35.

<sup>13</sup>A.A. Said Gatara, Moh. Dzulkiah Said, *Sosiologi Politik* (Bandung: Cv Pustaka Setia,2011), h. 91.

daerah yang ikut serta dalam pemilihan Bupati Lampung Barat tahun 2017, yang mana pada pemilihan Bupati Lampung Barat tahun 2017 silam ada 2 daftar calon bupati yang mencalonkan diri sebagai Bupati Lampung Barat periode 2017-2022 untuk menggantikan bupati sebelumnya yaitu Drs. Mukhlis Basri, M.M. Adapun calon bupati nomor urut satu yaitu H. Parosil Mabsus, S.pd dan wakilnya H. Mad Hasnurin. Sedangkan nomor urut dua yaitu DR. H. Edi Irawan Arief, S.E., M.E.c. dan wakilnya yaitu H. Ulul Azmi, S.H.

Pada pemilihan Bupati Lampung Barat tahun 2017 Kelurahan Pajar Bulan memiliki jumlah mata pilih yaitu sebesar 5.981 jiwa, yang terdiri dari jumlah mata pilih laki-laki sebesar 3.050 jiwa dan jumlah mata pilih perempuan sebesar 2. 931 jiwa.

Namun pada praktiknya masih ada masyarakat Kelurahan Fajar Bulan yang kurang berpartisipasi dan tidak menggunakan hak pilih nya pada pemilihan Bupati Lampung Barat yaitu sebesar 20% dari jumlah keseluruhan mata pilih yakni kurang lebih sebesar 1.341 jiwa yang terdiri dari jumlah laki-laki dan jumlah perempuan, padahal mereka sudah masuk dalam daftar pemilih tetap, data tersebut penulis peroleh dari PPS(Panitia Pemungutan Suara) Kelurahan Pajar Bulan.

Melihat penomena kurangnya partispasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada pilkada tahun 2017 sebagaimana telah diuraikan diatas, dirasa ada faktor yang menyebabkan terjadinya penomena tersebut, maka dari itu penulis mengambil penelitian yang berjudul “**Faktor – Faktor**

**Penyebab Rendahnya Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Hak Pilih Pada Pilkada Tahun 2017 Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Pada Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat).”**

**D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Faktor sajaapa yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada pilkada Tahun 2017?
2. Mengapa partisipasi masyarakat kurang dinamis dalam menggunakan hak pilih pada pilkada Tahun 2017 ditinjau dari Fiqh Siyasah?

**E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada pilkada Tahun 2017.
- b. Untuk mengetahui Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada pilkada Tahun 2017 ditinjau dari Fiqh Siyasah.

**2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan secara teoritis:



Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi para pembaca khususnya mengenai faktor yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada pilkada Tahun 2017 serta menambah wawasan dalam disiplin ilmu Fiqh Siyasah.

b. Kegunaan secara praktis:

Untuk memberikan informasi dan masukan bagi para pembaca berikutnya yang ingin melakukan penelitian dibidang siyasah serta untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana Hukum di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan.<sup>14</sup>

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). penelitian lapangan dilakukan untuk kancan kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.<sup>15</sup> Penelitian

---

<sup>14</sup>Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*(Bandar Lampung: 2015), h. 21.

<sup>15</sup>Etta Mamang Sangaji, *Metode Penelitian Pendekatan Praktik dalam Penelitian*(Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), h.21.

ini dengan menggali data yang bersumber dari lapangan yaitu berupa wawancara (*interview*) terhadap masyarakat Kelurahan Pajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat untuk mendapatkan informasi penggunaan hak pilih masyarakat pada pemilihan Bupati pada pilkada Tahun 2017 di tinjau dari Fiqh Siyasah.

b. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat deskriptif (menggambarkan) analisis, yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang telah ada. Data-data yang di dapat diambil sebagai rujukan untuk selanjutnya dianalisa secara sistematis untuk menunjang dalam pembahasan. Bentuk penelitian deskriptif yang digunakan yaitu studi analisis kritis, yaitu penelitian yang berusaha mencari pemecahan melalui analisa tentang faktor yang menyebabkan kurang nya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada pilkada 2017 di Kabupaten Lampung Barat.

c. Populasi dan Sampel

Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen/anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian<sup>16</sup>. Dalam proposal ini populasi nya adalah Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.

---

<sup>16</sup>Juliansyah, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Kencana,2010), h.147.

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti.<sup>17</sup>Sampel yang digunakan yaitu sampel bertujuan atau *purposive sample*. Yaitu penulis menentukan sampel berdasarkan tujuan tertentu, yaitu untuk memilih responden yang benar-benar tepat, relevan, dan kompeten dalam masalah yang sedang diteliti. Karena dengan keterbatasan waktu, tenaga, dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh. Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Lurah serta perangkat kelurahan yang lainnya, yang mengetahui karakteristik masyarakat Kelurahan Fajar Bulan. Adapun jumlah sampelnya yaitu sebanyak 8 orang.
- 2) Tokoh masyarakat dan tokoh agama, yaitu orang yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Kelurahan Fajar Bulan. Adapun jumlah sampelnya yaitu sebanyak 3 orang.
- 3) Warga masyarakat yang di dinilai mempunyai dalam masalah yang sedang diteliti, hal ini dapat diambil dari warga masyarakat dengan jenjang pendidikan tinggi. Adapun jumlah sampelnya yaitu sebanyak 2 orang.
- 4) Ketua TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang dinilai mengetahui tentang masalah yang sedang diteliti. Adapun jumlah ketua tps yaitu sebanyak 5 orang. Jadi jumlah keseluruhan sampel yaitu 18 orang.

---

<sup>17</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 174.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian yaitu dari Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang berada di luar lapangan penelitian atau bersifat data penunjang. Data sekunder ini diperoleh dari studi kepustakaan.

## 3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

- a. Metode Observasi

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.<sup>18</sup> Observasi dilakukan di Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.

- b. Metode Wawancara

Wawancara (interview) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden dicatat atau direkam.<sup>19</sup> Yaitu penulis melakukan

---

<sup>18</sup>Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*(Bandar Lampung: 2015), h. 105.

<sup>19</sup>*Ibid.*, h. 97.



wawancara terhadap masyarakat Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.<sup>20</sup>

**4. Metode Pengolahan Data**

Data-data yang terkumpul kemudian diolah pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara antara lain:

- a. Pemeriksaan data yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar, sesuai atau relevan dengan masalah.<sup>21</sup>
- b. Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- c. Sistematis data yaitu penempatan-penempatan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

**5. Metode Analisis Masalah**

Data-data yang terkumpul kemudian diolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan sekaligus dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti.

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, h. 106.

<sup>21</sup>Cholid Narbuto, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 83.

Analisa deskriptif kualitatif ini digunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan berfikir induktif.<sup>22</sup>



---

<sup>22</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian "suatu pendekatan praktik"* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 282.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pemilihan Kepada Daerah**

Undang-Undang Dasar Negara kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18, dengan penjelasannya, dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, yang pelaksanaannya diatur oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 1974.<sup>23</sup> Dalam Pasal 18 UUD 1945 dikatakan bahwa:

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.”<sup>24</sup>

Penjelasan pasal 18 Bab VI UUD 1945 menerangkan bahwa Negara Indonesia itu adalah suatu Negara kesatuan. Indonesia tidak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang juga berbentuk Negara. Daerah Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan provinsi dibagi lagi atas kabupaten/kota. Di setiap daerah tersebut bersifat otonom atau bersifat administratif belaka. Semuanya menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom diadakan

---

<sup>23</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*(Jakarta: Sinar Grafika, 2011). h. 90.

<sup>24</sup>*Ibid*, h. 92.

badan perwakilan daerah karena di daerah pun pemerintahan akan bersendikan dasar permusyawaratan.<sup>25</sup>

Maksudnya ialah bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi sejumlah daerah besar dan kecil yang bersifat otonom, yaitu daerah yang boleh mengurus rumah tangganya sendiri dan daerah administrasi, yaitu daerah yang tidak boleh berdiri sendiri. Untuk membentuk susunan pemerintahan daerah-daerah itu, pemerintah bersama-sama DPR telah menetapkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, yang dilaksanakan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 1974. Undang-undang itu mengatur pokok-pokok penyelenggaraan pemerintah daerah otonom dan pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pemerintahan pusat di daerah.<sup>26</sup>

Menurut C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil dalam bukunya.<sup>27</sup> Undang-Undang tentang pokok pemerintahan di Daerah, yang dimaksud dengan pemerintah daerah ialah kepala daerah, yaitu kepala pada umumnya, seperti Gubernur, Bupati, Dan Walikota Madya, serta DPRD. Kedudukan kepala daerah dan DPRD sama tinggi. Kepala daerah memimpin bidang Eksekutif dan DPRD bergerak di bidang Legislatif. Meskipun demikian, harus diakui bahwa pembuatan peraturan daerah tidak dapat dilakukan oleh DPRD sendiri, tetapi bersama-sama dengan kepala daerah dan DPRD. Mengingat luasnya tugas

---

<sup>25</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Kostitusionalisme Indonesia*(Jakarta: Sinar Grafika, 2011). h. 92.

<sup>26</sup>*Ibid.*, h. 92.

<sup>27</sup>C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia "Edisi Revisi"* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), h.144.



yang dihadapi oleh kepala daerah, perlu diadakan wakil kepala daerah. Akan tetapi, karena kondisi daerah berbeda-beda, pengisian jabatan wakil kepala daerah diadakan menurut kebutuhan.

Tugas utama kepala daerah ialah memimpin penyelenggaraan dan bertanggung jawab penuh atas jalannya pemerintah daerah. Kepala daerah tingkat I diangkat dan diberhentikan oleh presiden, sedangkan kepala daerah tingkat II diangkat oleh Menteri Dalam Negeri. Oleh karena itu, kepala daerah bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Sebagai pembantu Presiden, Menteri Dalam Negeri mengolah bahan-bahan pertanggungjawaban kepala daerah dan mengambil tindakan yang dianggap perlu serta melaporkan hal-hal yang mendasar kepada Presiden. Kepala daerah harus bertanggung jawab kepada Presiden, karena presiden adalah penanggung jawab tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan diseluruh wilayah Negara. Jadi, kepala daerah tidak bertanggung jawab kepada DPRD, tetapi kepala daerah berkewajiban memberikan keterangan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan pemerintah daerah yang dipimpinnya kepada DPRD.

Kepala daerah sebagai wakil pemerintah pusat merupakan penguasa tunggal sehingga ia disebut kepala wilayah. Tugasnya adalah memimpin penyelenggaraan urusan pemerintah umum atau urusan pemerintah pusat yang sebenarnya menjadi tugas pemerintah pusat di daerah. Oleh karena itu, ia bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dalam Negeri dan bukan kepada DPRD. Dalam menjalankan tugasnya itu, kepala wilayah

dibantu oleh sebuah sekretariat di bawah pimpinan seorang sekretaris wilayah yang diangkat oleh pemerintah pusat. Kepala daerah sebagai kepala daerah otonom juga menjadi wakil daerahnya karena ia telah mendapat dukungan dari rakyatnya di daerah.

Oleh karena itu Pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan sebuah proses demokrasi dimana terjadi pergantian kepemimpinan daerah pada tingkat lokal. Melalui pilkada, rakyat akan secara langsung memilih pemimpinnya di daerah, pilkada dengan kata lain merupakan seperangkat aturan atau metode bagi warga negara untuk menentukan masa depan pemerintah yang akan datang. Rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara, rakyat yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan serta menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh Negara dan pemerintahannya itu.<sup>28</sup>

Dalam pemilihan kepala daerah seperti gubernur dan bupati/ walikota sejak Indonesia merdeka hanya dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat, maka menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dalam Pasal 56 dijelaskan:

- (1). Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

---

<sup>28</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.414

(2). Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.<sup>29</sup>

Pemilihan kepala daerah menurut Khairudin Tahmid, bukan hanya memilih penguasa daerah, tetapi lebih merupakan mencari pemimpin yang mampu melayani dan mengabdikan untuk kepentingan seluruh rakyatnya. Pola pikir lama yang menempatkan kepala daerah sebagai penguasa harus diubah secara radikal menjadi pemimpin sesungguhnya, bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks ini sesungguhnya tugas kepala daerah terpilih sangat berat dan hanya mereka yang mampu mengemban tugas tersebut. Oleh karena itu, semua energi daerah harus dicurahkan untuk memilih pemimpin yang terbaik bagi kemajuan dan kesejahteraan daerahnya selama proses pemilihan kepala daerah berlangsung.<sup>30</sup>

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah didasarkan pada tiga asas, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah yakni UUD RI 1945 Pasal 18 ayat (2), ditegaskan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan ini menegaskan bahwa pemerintah daerah adalah suatu pemerintahan otonomi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pemerintah daerah hanya ada pemerintahan otonomi (termasuk tugas pembantuan). Prinsip baru dalam Pasal 18 lebih sesuai dengan

---

<sup>29</sup>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 56.

<sup>30</sup>Khairudin Tahmid, *Netralitas Lembaga Peradilan dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah*(Bandar Lampung: Fakta Press, 2008), h. 22.

gagasan daerah membentuk pemerintahan daerah sebagai satuan pemerintahan mandiri di daerah yang demokratis, tidak ada lagi unsur pemerintahan sentralisasi dalam pemerintahan daerah. Gubernur, Bupati, dan Walikota semata-mata sebagai pelenggara otonomi di daerah.<sup>31</sup>

1. Asas Desentralisasi, menurut Joeniarto, desentralisasi adalah memberikan wewenang dari pemerintahan Negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Undang-undang. Fungsi pemerintahan desentralisasi atau otonomi itu menunjukkan, satuan-satuan desentralisasi (otonomi) lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat. Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas dengan efektif dan lebih efisien. Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif. Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif.<sup>32</sup>

2. Asas dekonsentrasi, Amrah Muslimin mengartikan dekonsentrasi ialah pelimpahan sebagian dari kewenangan pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang ada di daerah. Menurut Joeniarto, dekonsentrasi adalah pemberian wewenang oleh pemerintah pusat (atau pemerintahan atasannya) kepada alat alat perlengkapan bawahan untuk menyelenggarakan urusan-urusannya yang terdapat di daerah. Asas dekonsentrasi dapat ditinjau dari tiga sisi,<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup>Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara "Edisi Revisi"* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h.328.

<sup>32</sup>*Ibid.*, h.329.

<sup>33</sup>*Ibid.*, h.332.



- a. Dari segi wewenang, asas ini memberikan/melimpahkan wewenang dari pemerintahan pusat kepada pejabat-pejabat di daerah untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah pusat yang ada di daerah, termasuk juga pelimpahan wewenang pejabat-pejabat atasan kepada tingkat dibawahnya.
- b. Dari segi pembentuk pemerintah berarti membentuk pemerintah lokal administrasi di daerah, untuk diberi tugas menyelenggarakan urusan pemerintah pusat yang ada di daerah.
- c. Dari segi pembagian wilayah, asas ini membagi wilayah Negara menjadi daerah-daerah pemerintah lokal administrative atau akan membagi wilayah Negara menjadi wilayah-wilayah yang administratif.
3. Asas tugas pembantu, menurut Joeniarto, disamping pemerintah lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. KEPADANYA dapat pula diberi tugas-tugas pembantuan (tugas *medebewind*, sertatrantra). Tugas pembantuan ialah tugas ikut melaksanakan urusan-urusan pemerintah pusat atau pemerintah lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga tingkat atasannya.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>*Ibid.*,h.334.

## **B. Hak Pilih Pada Pilkada**

Indonesia sejak awal kemerdekaannya menyatakan sebagai negara demokrasi (berkedaulatan rakyat). Demokrasi merupakan konsep atau perangkat kekuasaan yang mekanisme pengelolaan negaranya berdasarkan kehendak suara rakyat mayoritas. Demokrasi menganut prinsip kebebasan, prinsip kesamaan dan prinsip kehendak rakyat mayoritas. Kekuasaan diamanatkan kepada para wakil yang dipilih melalui pemilihan yang bebas berdasarkan suara mayoritas rakyat. Dengan sistem politik demokrasi akan menghasilkan sistem perumusan kebijakan yang lebih partisipatif.<sup>35</sup>

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut pilkada adalah sarana pelaksana kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sedangkan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Gubernur dan wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan wakil Bupati untuk kabupaten, serta Walikota dan wakil Walikota untuk kota.<sup>36</sup> Dalam sejarah ada dua cara pengangkatan kepala daerah yaitu pemilihan secara langsung dan pemilihan secara tidak langsung.

Pemilihan kepala daerah secara tidak langsung adalah pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh anggota DPRD sebagai wakil rakyat di daerah.

---

<sup>35</sup>Hepi Riza Zen "Politik Uang dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah" (On-Line), tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/205> ( 22 Desember 2018 Pukul 19,33 Wib)

<sup>36</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 1 ayat (1) dan (2).

Dalam praktik, sering dijumpai bahwa di Negara yang jumlah penduduknya sedikit dan ukuran wilayahnya tidak begitu luas saja pun, kedaulatan rakyat tidak dapat berjalan secara penuh. Apalagi di Negara-negara yang jumlah penduduknya banyak dengan wilayah yang sangat luas, dapat dikatakan tidak mungkin untuk menghimpun pendapat rakyat seorang demi seorang dalam menentukan jalannya suatu pemerintahan. Akibatnya, kedaulatan rakyat tidak mungkin dilakukan secara murni. Kompleksitas keadaan menghendaki bahwa kedaulatan rakyat itu dilaksanakan dengan melalui sistem perwakilan.<sup>37</sup>

Sedangkan pemilihan kepala daerah secara langsung adalah pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh rakyat melalui pemilihan umum (PEMILU). Adapun perbedaan mendasar antara pemilihan secara tidak langsung dan secara langsung adalah bahwa pada pemilihan secara tidak langsung, orang yang dipilih tidak langsung diberikan suara oleh rakyat melainkan mereka dipilih oleh sejumlah suara atau lembaga yang menduduki suatu jabatan karena telah memenangkan sejumlah suara rakyat dalam pemilihan, atau dipilih oleh suatu badan pemilihan yang anggotanya dipilih oleh rakyat, atau pada badan lain yang beranggotakan mereka-mereka yang dipilih oleh rakyat. Sedangkan pemilihan secara langsung adalah suara diberikan langsung oleh rakyat dengan kata lain rakyatlah yang ikut serta berpartisipasi memilih dengan menggunakan hak pilih suaranya kepada seorang calon yang bila berhasil akan memenangkan suatu jabatan.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup>Jimly Asshiddiqie, *Op, Cit.*, h.414.

<sup>38</sup>M. Noor Aziz, "Pengkajian Hukum tentang Pemilihan Kepala Daerah" (On-line), tersedia di: <http://www.bphn.go.id>> pkj\_pilkada (5 November 2018).

Hak pilih atau hak memilih adalah bentuk hak atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana di atur dalam pasal 27 ayat (1) serta pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 yang secara khusus juga diatur dalam Pasal 43 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang dijelaskan bahwa:

“setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>39</sup>

Setiap warga Negara Indonesia dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada, dibagi menjadi dua yakni hak pilih aktif dan hak pilih pasif.

d. Hak pilih aktif adalah setiap warga Negara yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk memilih anggota-anggota yang akan duduk dalam suatu badan perwakilan rakyat. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi diantaranya, sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. Seorang warga Negara Indonesia yang telah mempunyai hak memilih, baru bisa menggunakan haknya, apabila sudah terdaftar sebagai pemilih. Kepada pemilih terdaftar tidak diberikan kartu pemilih seperti pada pemilu 2004. Dalam memberikan suaranya seorang pemilih terdaftar cukup menunjukkan KTP atau identitas lain serta paspor bagi WNI yang berada diluar negeri. Seseorang yang telah mempunyai hak memilih, untuk dapat terdaftar sebagai pemilih, harus memenuhi persyaratan:

---

<sup>39</sup>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, pasal 43.

1. Tidak terganggu jiwa/ingatannya.
2. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sebaliknya seorang warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), kemudian ternyata tidak lagi memenuhi persyaratan tersebut diatas, tidak dapat menggunakan hak pilihnya.<sup>40</sup>

Syarat-syarat pemilih dalam pilkada diatur dalam:

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.yaitu:

Pasal 56:

- (1) Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.
- (2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara
- (3) Jika pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau surat keterangan domisili dari kepala desa atau sebutan lain/lurah.

Pasal 57:

- (1) untuk dapat menggunakan hak memilih, warga Negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Dalam hal warga Negara Indonesia tidak terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

---

<sup>40</sup>Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2009), h.168.



- (3) Untuk dapat didaftarkan sebagai pemilih, warga Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau
  - b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan, putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Warga Negara Republik Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih dan pada saat pemungutan suara tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Pasal 58:

- (1) Daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir digunakan sebagai sumber pemutakhiran data pemilihan dengan mempertimbangkan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan.
- (2) Daftar penduduk potensial pemilih pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi, dan divalidasi oleh menteri digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilu untuk pemilihan.
- (3) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) oleh PPS dilakukan pemuktahiran berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga, rukun warga, atau sebutan lain dan tambahan pemilih yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya hasil konsolidasi, verifikasi, dan validasi.
- (4) Daftar pemilih hasil pemuktahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada PPK untuk dilakukan rekapitulasi daftar pemilih tingkat PPK
- (5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemuktahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh PPK kepada KPU kabupaten/kota paling lambat 3 hari terhitung sejak selesainya pemuktahiran untuk dilakukan rekapitulasi daftar pemilih tingkat kabupaten/kota, yang kemudian ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara.
- (6) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diumumkan secara luas dan melalui papan pengumuman rukun tetangga dan rukun warga atau sebutan lain oleh PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat selama 10 (sepuluh) hari.
- (7) PPS memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak masukan dan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir.
- (8) Daftar pemilih sementara yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diserahkan kepada KPU kabupaten/kota untuk

ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap dan diumumkan oleh PPS paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap berakhir.

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemuktahiran data pemilih diatur dengan peraturan KPU.<sup>41</sup>

Pasal 59:

Penduduk yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap diberikan surat pemberitahuan sebagai pemilih oleh PPS

Hak pilih pasif (hak dipilih) adalah hak untuk dipilih menjadi anggota badan-badan perwakilan rakyat. Adapun persyaratan Calon Kepala Daerah sesuaidalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undangNo. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undangadalah sebagai berikut :

Pasal 7:

Warga Negara Indonesia yang dapat menjadi calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, serta Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
- (2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

---

<sup>41</sup>Undang-Undang Nomor10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

- b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar negara republik indonesia tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. Dihapus;
- e. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota;
- f. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
- g. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- j. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- k. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- l. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- n. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;
- o. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk calon Wakil Bupati/calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;
- p. Berhenti bagi jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- q. Tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota;
- r. Dihapus;
- s. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan;

- t. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan; dan
- u. Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon

### C. Partisipasi Politik

Partisipasi merujuk pada keterlibatan dan interaksi organisasi dan institusi yang memiliki tanggung jawab terhadap atau berhubungan dengan tindakan kolektif di bidang publik. Partisipasi dalam pemerintahan berhubungan kuat dengan gagasan dan pengambilan keputusan secara interaktif, dimana warga, pengguna, kelompok kepentingan dan organisasi publik dan swasta yang memiliki resiko dalam sebuah keputusan dilibatkan dalam persiapannya atau menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan tersebut. Dari sudut pandang Negara, demokrasi mengajarkan bahwa partisipasi sangat diperlukan untuk membangun pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan respon terhadap kebutuhan masyarakat.<sup>42</sup>

Menurut Trubus Rahardiansah P., partisipasi secara harfiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagi proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan para pemimpinnya, karena kalau ini yang terjadi maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik. Partisipasi juga diartikan sebagai berperan serta atau ikut serta, yang selama ini dipahami masyarakat Indonesia. Banyak

---

<sup>42</sup>Gunawan Suswanto, *Mengawal Penegak Demokrasi* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2016), h.103.

kegiatan publik, baik yang memiliki dimensi politik maupun non-politik, dapat terselenggaranya dengan baik karena adanya peran serta atau keikutsertaan warga.<sup>43</sup>

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (partisipasi) adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan Warga Negara, maka Warga Negara berhak serta menentukan isi keputusan yang mempengaruhi hidupnya. Dengan kata lain keikutsertaan warga Negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik sangat diperlukan demi menciptakan keputusan yang tidak merugikan kehidupan masyarakat.<sup>44</sup>

Menurut Miriam Budiarjo partisipasi politik adalah kegiatan seseorang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yakni dengan cara memilih pimpinan Negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*publik policy*).<sup>45</sup>

Tafsiran lebih luas mengenai partisipasi politik dikemukakan Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, dengan mengatakan, “*by political participation we mean activity by private citizens designed to influence government decision making. Participation may be individual or collective,*

---

<sup>43</sup>Efriza, *Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012), h.152.

<sup>44</sup>Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasi, dan Civil Society*(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 63.

<sup>45</sup>A.A. Sahid Gantara Fh, Moh. Dzulkiah Said, *Sosiologi Politik “Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian”* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 91.



*organized or spontaneous, sustained or sporadic, peaceful, or violent, legal or illegal, effective or ineffective.*” Menurut tafsiran tersebut, partisipasi politik erat kaitanya dengan kesadaran politik semakin seseorang sadar bahwa dirinya diperintah, maka ia akan menuntut diberikan hak bersuaradalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, tingkat partisipasi yang rendah dalam politik umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, yang dapat diartikan sebagai ketidakpedulian warga terhadap masalah kenegaraan.<sup>46</sup>

Selain definisi tersebut, partisipasi politik pun dapat dijelaskan sebagai usaha terorganisir oleh para warga Negara untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijakan umum. Usaha ini dilakukan berdasarkan kesadaran akan tanggung jawab mereka terhadap kehidupan bersama sebagai suatu bangsa dalam suatu Negara. Dalam hal ini, partisipasi politik berbeda dengan mobilisasi politik, yaitu usaha pengerahan masa oleh golongan elite politik untuk mendukung kepentingan-kepentingannya. Mobilisasi politik tampak antara lain dalam upaya pengerahan sejumlah besar orang oleh golongan elite tertentu untuk mendengarkan pidato-pidato politik dala suatu rapat umum, atau dalam upaya menggerakkan sejumlah besar orang untuk mengacaukan suatu kedaulatan asing.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>*Op.Cit*, h. 105.

<sup>47</sup>Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), h. 147.

Berdasarkan beberapa definisi partisipasi politik diatas, menurut A.A. Sahid Gantara, Moh. Dzulkiah Said,<sup>48</sup> terdapat hal substantif yang menjadi “rambu-rambu” berkenaan dengan partisipasi tersebut, yaitu:

1. *Kegiatan-kegiatan nyata.* Partisipasi politik yang termasuk kegiatan-kegiatan nyata adalah kegiatan-kegiatan yang dapat diamati secara kasat mata, bukan sikap-sikap atau orientasi.
2. *Bersifat sukarela.* Yaitu kegiatan yang didorong oleh dirinya sendiri atau kesadaran sendiri (*self motion*), bukan digerakan oleh pihak lain, seperti bayang-bayang sifat pemerintah, desakan, manipulasi. Jika pemicunya adalah pihak lain, kecenderunganya bukan partisipasi politik melainkan mobilisasi politik. Jika pemicunya kesadaran diri sendiri, hal tersebut merupakan partisipasi dalam pengertian otonom.
3. *Dilakukan oleh warga negara atau masyarakat biasa, baik individu maupun kelompok masyarakat.* Partisipasi yang dilakukan oleh warga atau masyarakat biasa ialah mengisyaratkan seolah-olah menutup rapat kemungkinan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh nonwarga negara biasa dalam kehidupan politik.
4. *Memiliki tujuan ikut serta dalam kehidupan politik, memengaruhi kebijakan pemerintah dan/ atau mencari jabatan politik.* Tujuan tersebut adalah ikut serta dalam kehidupan politik sebagai penggerak untuk mendapatkan kesukarelaan dalam berpartisipasi. Bila tidak demikian,

---

<sup>48</sup>A.A. Sahid Gantara Fh, Moh. Dzulkiah Said, *Sosiologi Politik “Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian”* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 92.

orang yang terlibat dalam kehidupan politik akan berada dalam keterpaksaan.

5. *Memiliki tingkatan-tingkatan partisipasi*, yaitu keterlibatan individu-individu berbanding lurus dengan bentuk-bentuk partisipasi yang tersedia dalam sistem dan struktur politik yang ada. Dari yang paling bawah sampai tingkatan yang paling tinggi; dan dari yang paling luas cakupannya sampai yang paling sempit.

Dalam bukunya Gunawan Suswanto berpendapat bahwa partisipasi dapat dibedakan menurut frekuensi dan intensitasnya.<sup>49</sup> Terkait hal ini, David F. Roth dan Frank L. Wilson membagi masyarakat menjadi empat kategori, yaitu aktivis, partisipan, penonton, dan apolitis. Selain itu perlu diperhatikan sejumlah jebakan yang membuat partisipasi menjadi kurang bermakna. Mengutip Thubany, sejumlah jebakan itu, pertama, partisipasi yang di mobilisasi yang sesungguhnya merupakan pemaksaan dan eksploitasi. Kedua, partisipasi kerap dipahami sebagai bentuk dukungan masyarakat, namun sebenarnya merupakan sesuatu yang dipaksakan melalui instrumen kebijakan dan peraturan. Ketiga, partisipasi sering kali dipahami dan di praktikkan hanya sebagai bentuk sosialisasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Keempat, partisipasi hanya dipahami dalam pengertian nominal, yakni tindakan menjatuhkan pilihan (*vote*), dan bukan dalam pengertian substantif sebagai upaya menyampaikan suara (*voice*). Kelima, partisipasi cenderung dipahami

---

<sup>49</sup>Gunawan Suswanto, *Mengawal Penegak Demokrasi* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2016), h. 106 .

secara formal prosedural. Keenem, partisipasi yang melahirkan tirani, salah satunya adanya kecenderungan untuk mengedepankan pendekatan konfrontatif, sehingga akhirnya menjauhkan proses pembelajaran dan *trust building*.

#### 1. Tipologi partisipasi politik

Secara umum tipologi politik dibedakan atas beberapa macam yaitu:

- a. Partisipasi aktif, merupakan partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output.
- b. Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya mematuhi dan melaksanakan segala peraturan pemerintah yang telah diputuskan.
- c. Golongan putih atau yang sering disebut dengan golput, golongan ini juga sering disebut kelompok apatis, karena mereka menganggap politik yang ada telah menyimpang dari apa yang diharapkan.<sup>50</sup>

Tipologi partisipasi politik dapat pula didasarkan pada jumlah pelaku, yaitu individual dan kolektif. Partisipasi politik individual ialah kegiatan warga Negara secara perseorangan terlibat dalam kehidupan politik atau kegiatan politik. Adapun partisipasi politik kolektif adalah kegiatan warga Negara secara serentak untuk memengaruhi penguasa seperti kegiatan dalam pemilihan umum. Selanjutnya, partisipasi kolektif dibagi dua, yaitu partisipasi kolektif konvensional seperti kegiatan dalam pemilihan umum dan partisipasi

---

<sup>50</sup>A. Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 288.

kolektif nonkonvensional, seperti pemogokan yang sah, pembangkangan warga Negara pemilikan bangunan umum dan huru-hura.<sup>51</sup>

## 2. Model partisipasi politik

Partisipasi politik sangat terkait erat dengan seberapa jauh demokrasi diterapkan dalam pemerintahan. Pada Negara yang telah stabil demokrasinya, biasanya tingkat partisipasi politik warganya sangat stabil, tidak fluktuatif. Sebaliknya, Negara yang otoriter, yang kerap memakai kekerasan untuk memberangus setiap prakarsa dan partisipasi warganya. Negara yang sedang meniti proses transisi dari otoritarianisme menuju demokrasi disibukkan dengan frekuensi partisipasi yang meningkat tajam, dengan jenis dan bentuk partisipasi yang sangat banyak, mulai dari yang bersifat "konstitusional" hingga yang bersifat merusak sarana umum.<sup>52</sup>

Tingkat partisipasi masyarakat dalam satu Negara berbeda dengan Negara lainnya dengan kata lain tidak semua warga Negara ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik. Faktor-faktor yang memengaruhi tinggi-rendahnya partisipasi politik seseorang ialah kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah. Dimaksud dengan kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara. Kemudian yang dimaksud dengan sikap dan kepercayaan kepada pemerintah ialah penilaian seseorang terhadap pemerintah. Berdasarkan tinggi-rendah kedua faktor tersebut, Jeffry M. Paige memberikan model partisipasi menjadi empat tipe:

---

<sup>51</sup>A.A. Said Gatara, Moh. Dzulkiah Said, *Sosiologi Politik Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*(Bandung: Cv Pustaka Setia, 2011) h.99.

<sup>52</sup>Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam* (Bandung: Cv Pustaka Setia,2012), h. 26.



1. Partisipasi aktif, apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi maka partisipasi politik seseorang ini cenderung aktif.
2. Partisipasi apatis, kondisi yang berlawanan dengan partisipasi aktif, hal mana kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi politik cenderung pasif-tertekan (apatis).
3. Militan (radikal). Kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah lemah maka perilaku yang muncul adalah militan radikal.
4. Partisipasi pasif, kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi maka partisipasi ini disebut tidak aktif (pasif).<sup>53</sup>

### 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik

Partisipasi politik merupakan suatu kegiatan yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ramlan Surbakti menyebutkan dua *variable* penting yang dapat mempengaruhi tinggi dan rendahnya suatu partisipasi politik seseorang. *Pertama*, kesadaran politik terhadap pemerintah. Maksudnya ialah kesadaran hak dan kewajiban seorang warga Negara. Misalnya, hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial, dll. *Kedua*, mengenai bagaimana penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahan itu sendiri.<sup>54</sup>

- a. Faktor sosial ekonomi. Kondisi sosial ekonomi meliputi tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan jumlah keluarga.
- b. Faktor politik Arnstein. Peran serta politik masyarakat didasarkan pada politik untuk menentukan suatu produk akhir. Faktor politik meliputi hal berikut:

---

<sup>53</sup>Efriza, *Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012), h.152.

<sup>54</sup>Michael Rush, Philip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h.124.

### 1). Komunikasi politik

Komunikasi politik adalah suatu komunikasi yang mempunyai konsekuensi politik, baik secara actual maupun potensial, yang mengatur kelakuan manusia dalam keberadaan suatu konflik. Komunikasi politik antara pemerintah rakyat sebagai antara dua pihak yang menerapkan etika.

### 2). Kesadaran politik

Kesadaran politik menyangkut pengetahuan, minat, dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik. Tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan atau pembangunan.

### 3). Pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan

Pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan akan menentukan corak dan arah suatu keputusan yang akan diambil.<sup>55</sup>

- c. Faktor fisik individu sebagai sumber. Kehidupan termasuk fasilitas serta ketersediaan pelayanan umum. Faktor lingkungan adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan, kondisi, makhluk hidup, tempat berlangsungnya berbagai kegiatan interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta lembaga dan pranatanya.

---

<sup>55</sup> Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2012), h. 30.

d. Faktor nilai budaya. Menurut Gabriel Almond dan Sidney Verba, nilai budaya politik merupakan basis yang membentuk demokrasi, hakikatnya adalah politik, baik etika politik maupun teknik atau peradaban masyarakat. Faktor nilai budaya menyangkut persepsi, pengetahuan, sikap, dan kepercayaan politik.<sup>56</sup>

Menurut Nazaruddin Sjamsuddin, Zulkifli Hamid, dan Tato Pribadi, tinggi rendahnya partisipasi politik di negara-negara berkembang sangat ditentukan oleh tiga faktor utama. Faktor-faktor tersebut adalah tingkat pendidikan, tingkat kehidupan ekonomi, dan fasilitas-fasilitas yang memungkinkan berlangsungnya partisipasi politik. Salah satu fasilitas yang dapat memungkinkan berlangsungnya partisipasi politik adalah adanya suatu sistem komunikasi yang lancar dalam masyarakat dan sistem politik. Ketiga faktor tersebut memperlancar atau menghambat berlangsungnya kegiatan partisipasi politik.<sup>57</sup>

#### **D. Partisipasi Politik Dalam Islam**

Politik Islam merupakan pandangan Islam dengan kekuasaan dan Negara yang melahirkan sikap dan perilaku politik serta budaya politik yang berorientasi pada nilai-nilai Islam. Sikap dan perilaku serta budaya politik.<sup>58</sup>

Partisipasi politik merupakan suatu pemberian amanat terhadap calon yang dipercaya yang sesuai dengan nilai-nilai Islami. Partisipasi politik juga

---

<sup>56</sup>*Ibid*, h. 31.

<sup>57</sup>Efriza, *Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012), h.194.

<sup>58</sup>Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2000), h. 3.

diartikan sebagai keterlibatan individu maupun organisasi politik dalam mengambil keputusan yang terkait dengan kemaslahatan umum diinstitusi politik formal maupun informal, ditingkat nasional maupun daerah berserta seluruh aktifitasnya seperti pemilihan umum, koalisi, dan aktifitas lainnya dengan menyuarakan kebaikan dan meminimalisir keputusan yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Asas utama partisipasi politik adalah *tahshilul mashalih* dan *taqlilul mafasid* (meraih maslahat dan mengurangi mafsadat). Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: “bahwa syariat datang untuk menghasilkan maslahah dan menyempurnakannya, menghilangkan mafsadat (kerusakan) dan meminimalisirnya. Syariat lebih mengutamakan dan menguatkan kebaikan yang lebih besar di antara dua kebaikan (jika harus memilih salah satunya) dan mendukung keburukan yang lebih ringan di antara dua keburukan (jika harus memilih salah satunya), lalu memilih dan mengambil yang paling maslahat dengan mengabaikan yang lebih rendah, dan menghilangkan yang lebih besar mudharatnya dengan menanggung resiko mengambil madharat yang lebih rendah dan ringan”.<sup>59</sup>

Seperti yang dijelaskan Allah dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila*

---

<sup>59</sup>Ahmad Sahal Hasan, “Partisipasi Politik” (On-Line), tersedia di: <http://www.dakwatuna.com/2014/03/20/48095/partisipasi-politik/amp/> (24 juli 2018).

*menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”(Q.S. An-Nisa ayat. 58).*

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa Allah SWT telah memerintahkan kepada manusia untuk berperan aktif dalam politik dengan demikian semua masyarakat harus berpartisipasi politik baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipercaya untuk menjadi pemimpin yang mampu menjalankan amanat rakyat yang sesuai dengan Al-Quran dan hadist.

Seperti dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 38 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ٣٨

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka” (Q.S. Asy-Syura ayat. 38) <sup>60</sup>

Prinsip musyawarah bagi para pemimpin negara dan para penguasa juga masyarakat merupakan tolak ukur dari dilaksanakannya sikap saling menghargai pendapat dan melepaskan diri dari sikap mengklaim kebenaran sendiri. Dalam hal bermusyawarah ini sudah dipraktikan jauh sebelum bani umayyah. Pada masa *khulafa Al-Rasyidin* terjadilah musyawarah di saqifah Bani Sa'idah tentang pemilihan khalifah. Hal itu terjadi karena Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan dia sebagai pemimpin umat Islam setelah beliau. Beliau tampaknya menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum muslimin sendiri

---

<sup>60</sup>Departemen Agama RI, *Mushaf Al- Qur'an* (Bandung: Cv Penerbit Dipenogoro, 2012), h. 487.



untuk menentukannya.<sup>61</sup> Allah memerintahkan segala urusan diputuskan dengan cara musyawarah.

Dengan demikian partisipasi politik dalam Islam tidak lepas menggunakan prinsip musyawarah dimana di dalam Islam dikenal dengan istilah *syura'* yang berasal dari kata *syawara yusawiru* yang berarti menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu. Jadi, *syura'* atau musyawarah dapat diartikan yaitu saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat.<sup>62</sup>

Kata "*syura*" juga berasal dari *syawa-ra* yang secara etimologi berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Sejalan dengan pengertian ini, kata *syura* atau dalam bahasa Indonesia menjadi "musyawarah" mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Dengan demikian, keputusan yang diambil berdasarkan *syura* merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi kepentingan kehidupan manusia.<sup>63</sup>

Dalam Al-Qur'an terdapat dua ayat yang mengatur *syura*. Pertama, ayat 159 surat Ali Imran. Ayat ini turun di Madinah dan turun dalam konteks tertentu, yaitu perang uhud. kedua, ayat 38 surat As-Syura. Ayat ini turun

---

<sup>61</sup>Badri Yatim, *Sejarah Peradapan Islam* (Jakarta: Rawajawi Pers, 2013), h. 35.

<sup>62</sup>Tiyas Ayu Yulinda, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Desa Pampang Tangguk Jaya*"(Skripsi Program Sarjana Siyasah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Intan Lampung 2016), h.37.

<sup>63</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 214.

dalam periode mekah, ketika permusuhan masyarakat mekah sedang memuncak sehingga sebagian para sahabatharus berhijrah.<sup>64</sup>

Adapun bagaimana cara melakukan musyawarah, Allah tidak menentukan secara perinci. Ini diserahkan sepenuhnya kepada manusia. Dalam suatu pemerintahan atau Negara, boleh saja musyawarah ini dilakukan dengan membentuk suatu lembaga tersendiri, seperti parlemen atau apapun namanya.<sup>65</sup> Penjelasan Al-Qur'an tidak selamanya tegas dan terperinci, melainkan kebanyakan hanya bersifat garis besar, sehingga dibutuhkan penjelasan yang lebih lanjut dari rosul.<sup>66</sup>

Musyawarah termasuk perkara yang sistem dan batasannya tidak dibuat, sebagai rahmat untuk manusia bukan karna lupa. Memberikan keleluasaan kepada mereka dan memberikan hak penuh kepada mereka untuk memilih apa yang bisa diterima oleh akal dan dipahami oleh manusia, dan selama tujuannya adalah dasar musyawarah serta untuk menciptakan Undang-undang yang adil yang menyatukan rakyat bukan menceraikannya yang mengembangkan dan membangun bukan meruntuhkan dan membinasakan.<sup>67</sup> Tujuan dari hal itu agar rakyat ikut andil dalam perkara musyawarah dan rincian partisipasi atau andilnya diserahkan kepada mereka dan perkara perincian ini pun berbeda-beda sesuai perbedaan sosial kemasyarakatan disatu

---

<sup>64</sup>Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam(Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia)*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2007), h. 164.

<sup>65</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*(Jakarta: Prenandamedia Group, 2014), h. 219.

<sup>66</sup>Saefudin al-Amidi, *Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam*, jilid 3 (Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983), h. 141.

<sup>67</sup>Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*(Jakarta: Amzah, 2005), h.73.

masa dan satu tempat.<sup>68</sup> Prinsip musyawarah bagi para pemimpin Negara dan para penguasa juga masyarakat merupakan tolok ukur dari dilaksanakannya sikap saling menghargai pendapat dan melepaskan diri dari sikap mengklaim kebenaran sendiri.<sup>69</sup>

Dalam hal bermusyawarah ini sudah dipraktikkan jauh sebelum Bani Umayyah. Pada masa Khulafa Al-Rasyidin terjadilah musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah tentang pemilihan khalifah. Hal itu terjadi karena Nabi Muhammad SAW. tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin politik umat islam setelah beliau wafat. Beliau tampaknya menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum muslimin sendiri untuk menentukannya.<sup>70</sup>

Muhammad Ashad berpendapat bahwa *syura* tidak saja harus dijadikan kaidah musyawarah, sebagai satu asas yang diterapkan pada semua aspek kehidupan politik, tetapi harus dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari system pemerintah itu sendiri.<sup>71</sup>

Sebagaimana halnya *syura*, demokrasi juga menekankan unsur musyawarah dalam mengambil keputusan. Demokrasi yang diartikan sebagai bentuk kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sebagaimana di definisikan *Abraham Lincoln*, mengharuskan adanya partisipasi rakyat dalam memutuskan suatu permasalahan dan mengontrol

---

<sup>68</sup>*Ibid.*, h.72

<sup>69</sup>Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* ( Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 35.

<sup>70</sup>*Ibid.*, h. 36

<sup>71</sup>Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam*(Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia)(Bandung: Cv Pustaka Setia, 2007), h. 56.

pemerintah yang berkuasa. Musyawarah dapat dilakukan dalam hal apa saja asalkan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat Islam.

#### **E. Hak Pilih Menurut Fiqh Siyasah**

Islam tidak hanya berbicara tentang ibadah *mahdhah* dan masalah yang bersifat terbatas, melainkan berbicara juga tentang kepemimpinan, politik, Negara, dan hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin, atau antara yang berkuasa dengan yang dikuasai. Bahkan seorang pemimpin harus memegang janji, jujur, amanah dan bertanggung jawab untuk menjalankan kekuasaan nya berdasarkan kepentingan umum, itu adalah inti sari ajaran Islam yang agung.<sup>72</sup>

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup seorang diri, sesuai dengan pendapat Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada dalam bukunya,<sup>73</sup> kebutuhan hidup yang beraneka ragamakan menuntutnya agar senantiasa berinteraksi dengan manusia lain. Perbedaan pendapat, ambisi, dan kepentingan masing-masing pihak yang muncul dalam proses interaksi tersebut tidak menuntut kemungkinan akan memicu lahirnya konflik, pertikaian, penindasan, peperangan dan pembunuhan atau pertumpahan darah, yang pada gilirannya nanti bisa berimplikasi pada terjadinya kehancuran total dalam berbagai dimensi kehidupan umat manusia itu sendiri untuk dapat menghindari kemungkinan terjadinya hal serupa itu dan

---

<sup>72</sup>Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam, Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani, dan Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 59.

<sup>73</sup>Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), h. 96.

agar kehidupan dalam masyarakat dapat berjalan dengan baik, tertib, aman, damai, dan teratur, maka perlu dipilih seorang pemimpin yang akan memandu rakyat menggapai segala manfaat sekaligus menghindarkan mereka dari berbagai mafsadat (kerusakan).

Fiqh siyasah tidak mengharuskan bahwasanya pemilihan pemimpin harus dipilih langsung maupun secara perwakilan. Setelah rasul meninggal dunia, pengembalian amanah untuk menyelesaikan masalah hukum, beralih kepada para sahabat mereka mengikuti cara-cara yang dilakukan rasul dalam penyelesaiannya, mula-mula merujuk pada Al-Qur'an dan selanjutnya kepada sunah.<sup>74</sup> Persoalan pemilihan pemimpin dan syarat pemilihan pun diserahkan sepenuhnya oleh ijtihad manusia, agar tetap sesuai dengan perkembangan masyarakat. Islam hanya menggariskan prinsip tentang pemilihan pemimpin dan syarat-syarat pemilihan harus mengabdikan kepada kemaslahatan/kepentingan rakyat dan menjamin partisipasi setiap individu di dalamnya. Al-Qur'an juga tidak memberikan petunjuk teknis bagaimana kepala pemerintahan dipilih. Juga Rasulullah SAW tidak membicarakan atau menunjuk siapa yang akan menggantikannya dalam kedudukannya sebagai pemimpin umat Islam sesudahnya. Ini dipandang sebagai isyarat bahwa persoalan kepemimpinan umat diserahkan agar diselesaikan sendiri oleh umat Islam dengan musyawarah<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup>Sayyid Muhammad Musa, *Al-Ijtihad Wa Mada Hajatina Ilaihi Haza Al-Ashr* (Mishar: Dar Al-Kutub Al-Hadisah, 1973), h. 37.

<sup>75</sup>Abdul Mun'im Salim, *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al - Qur'an* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h.303.



Sistem musyawarah juga pernah dilakukan pada masa *Khulafah Al-rasyiddinyakni* Abu Bakar Ash-Shiddiq sebelum beliau meninggal pada Tahun 634 M/13 H, Abu Bakar menunjuk Umar Ibn Al-Khathahab sebagai pengganti beliau. Namun Selama zaman pemerintahan Abu Bakar tidak pernah meninggalkan prinsip musyawarah dalam suatu penetapan keputusan, khususnya permasalahan yang menyangkut urusan kenegaraan. Penunjukan Umar bin Khattab sebagai pengganti Abu Bakar memang merupakan suatu yang baru, tetapi perlu di catat bahwa ini dilakukan dalam bentuk rekomendasi atau saran yang diserahkan pada persetujuan ummat. Tidak ada ikatan atau paksaansama sekali mengenai penunjukan itu dan jika berkehendak ummat bisa saja menolaknya seandainya mereka menginginkannya, namun Umar adalah orang yang memiliki sifat-sifat pemimpin besar dan selama pemerintahan Abu Bakar, terlihat keperibadian Umar berkembang cepat.<sup>76</sup> Itulah alasan mengapa Abu Bakar menunjuk Umar sebagai Khalifah kedua setelah Ia, kemudian terpilihlah Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua pengganti Abu Bakar, meskipun Ia tidak mencalonkan diri tetapi melalui jalur musyawarah dengan para sahabat yang paling di percaya secara bersama dan kemudian menunjukkan kehendak untuk memilih Umar, kemudian keputusan itu dilemparkan kepada kaum muslim yang pada gilirannya menerima.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup>Shaban, *Sejarah Islam "Penfsiran Baru"* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), h. 41.

<sup>77</sup>Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Amzah, Cet. Ke-3, 2013), h. 103.

Pada masa khalifah Umar Ibn al-Khathtab Gubernur diangkat dengan mempunyai otoritas dan otonomi yang luas, mereka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pembantu khalifah. Dalam hal rekrutmen pejabat khalifah Umar terkenal sangat selektif dan mementingkan profesionalitas dan kemampuan dalam bidang tugasnya. Disamping itu aspirasi masyarakat setempat yang berkembang juga didengar oleh Umar, dengan demikian Umar menjauhkan dengan kebijaksanaan nepotisme dan main drop-drop dari atas untuk menentukan pejabat, dalam sebuah kasus Umar pernah memecat Ammar Ibn Yasir sebagai gubernur Kuffah karena aris bawah merasa tidak puas atas kepemimpinannya.<sup>78</sup>

Sedangkan menurut sejarah Islam Mengenai pemilihan/pengangkatan kepala daerah dalam Islam, kepala daerah bukanlah hasil pilihan rakyat, melainkan diangkat oleh Khalifah. Dalam kitab-kitab hadits dan juga sirah bahwa kepala daerah dalam Islam dahulu selalu diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai kepala negara. Misalnya Muadz bin Jabal yang diangkat sebagai Gubernur Provinsi Yaman. Juga Ziyad bin Labid yang diangkat Rasulullah SAW sebagai gubernur propinsi Hadhramaut, serta Abu Musa Al-Asyari sebagai Gubernur provinsi Zabid dan Aden. jika diukur dengan timbangan Syariah Islam, pengangkatan gubernur itu hanyalah melalui pengangkatan oleh khalifah bukan lewat cara pemilihan oleh rakyat di

---

<sup>78</sup>Muhammad Iqbal, *Op, Cit.*, h. 58

propinsi yang bersangkutan, bukan pula melalui cara penetapan secara otomatis sebagai jabatan yang diwariskan secara turun temurun.<sup>79</sup>

Menurut Imam Al-Mawardi dalam bukunya *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*,<sup>80</sup> menerangkan bahwa pemberian jabatan *imamah* (kepemimpinan) kepada orang yang mampu menjalankan tugas diatas pada ummat adalah wajib berdasarkan ijma' (consensus ulama), kendali Al-Asham menyimpang dari ijma' mereka. Sekelompok orang berpendapat, bahwa pengangkatan *imam* (khalifah) hukumnya wajib berdasarkan akal, sebab watak orang-orang berakal mempunyai kecenderungan taat kepada *imam* (khalifah) yang melindungi mereka dari segala bentuk ketidakadilan, memutuskan konflik dan permusuhan yang terjadi diantara mereka. Tanpa *imam* (khalifah), manusia dalam keadaan *chaos*, dan menjadi manusia yang tidak diperhitungkan bangsa lain. Al-Afwah Al-Audi, salah seorang penyair jahiliyah berkata,

*“Manusia itu dalam keadaan kacau jika tidak ada orang-orang mulia diantara mereka dan mereka tidak mulia jika orang-orang bodohnya berkuasa”*

Kelompok lain berkata, bahwa pengangkatan *imam* (khalifah) hukumnya wajib berdasarkan syariat, dan bukan berdasarkan akal. Sebab *imam* (khalifah) itu bertugas mengurus urusan-urusan agama, dan bisa jadi akal tidak mengkategorikan *imamah* (kepemimpinan) sebagai ibadah, kemudian

---

<sup>79</sup>Sukses Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Fiqh Siyasah” (On-Line), Tersedia di: <http://digilib.uinsby.ac.id/966/5/Bab%202.pdf> (10 oktober 2018).

<sup>80</sup>Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Shultaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, terjemahan Fadli Bahri (Jakarta: PT. Darul Palah, 2013), h.2.

tidak mewajibkan *imamah* (kepemimpinan) tersebut. Akal hanya menghendaki hendaknya setiap orang dari orang-orang berakal melindungi melindungi dirinya dari segala bentuk ketidakadilan, dan pemutusan hubungan serta bertindak dengan adil dalam pelayanan dan komunikasi, kemudian ia bertindak dengan akalnya sendiri dan bukan dengan akal orang lain. Namun syariat menghendaki bahwa segala persoalan itu harus diserahkan kepada pihak yang berwenang dalam agama.

Seluruh ulama Sunni, Murji'ah dan Syi'ah serta mayoritas ulama Mu'tazilah dan Khawarij sepakat bahwa memilih imam merupakan sesuatu yang sangat urgen untuk dilakukan. Dalam mazhab Syi'ah eksistensi seorang imam itu bahkan lebih penting artinya ketimbang dalam pandangan mazhab-mazhab lain. Jika Syi'ah mengkategorikan keharusan adanya imam sebagai bagian dari rukun iman, maka demikian halnya dengan perspektif mazhab-mazhab lain. Urgensi adanya imam dalam pandangan kaum Syi'ah sama pentingnya dengan adanya para Rasul. Beriman kepada imam sama wajibnya dengan beriman kepada Allah, Rasul, dan kitab-kitabnya. Tanpa mempercayai imam, maka keimanan seseorang dianggap tidak sah. Pada hari kiamat kelak ia akan mendapat murka Tuhan dan kekal dalam neraka.<sup>81</sup>

Berbeda dengan pendapat diatas, segelintir individu dari kalangan Mu'tazilah seperti abu bakar al-Asham, Hisyam Ibn Amr al-futi, dan dari kalangan khawarij (sekte najdah), Athiyah Ibn Amr al-Hanafi menyatakan bahwa memilih imam tidak urgen dilakukan. Dalam pandangan mereka yang

---

<sup>81</sup>Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasaah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: penerbit erlangga, 2008), h. 96.

urgen atau yang wajib itu bukan mengangkat imam, tapi melaksanakan hukum-hukum Allah dan menegakkan kebenaran. Apabila umat Islam telah berkonsensus untuk berlaku adil, tidak saling menganiaya dan dapat merealisasi hukum-hukum Allah, maka saat itu mereka tidak lagi memerlukan imam. Akan tetapi, disaat kondisi kacau dan timbul perselisihan, maka pada saat itu, menurut Abu Bakar al-Asham, barulah umat Islam perlu memilih imam, yang akan membantunya mengatasi kekacauan dan perselisihan yang terjadi diantara mereka.

Hisyam al-Futi sebaliknya berpendapat umat Islam baru perlu memilih imam disaat kondisi aman, bukan pada waktu suasana kacau. Apabila suasana sedemikian kacau dan banyak terjadi perbuatan keji yang dapat mengakibatkan terbunuhnya imam, maka saat itu umat Islam tidak wajib mengangkat kepala imam.<sup>82</sup>

Adapun tatacara pemilihan kepala daerah dalam Islam yaitu dengan dipilih oleh imam yang mempunyai kapabilitas untuk menduduki jabatan kepala daerah karena syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin daerah cukup banyak, dan itu telah tercantum dalam perundang-undangan pemerintahan dalam masalah pengangkatan kepala daerah. Pengangkatan melalui pemilihan diharapkan nantinya dapat memilih para kandidat yang benar-benar memiliki kualitas kepemimpinan.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup>*Ibid*, h. 100.

<sup>83</sup>M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 223.



Jika Imam mengangkat Gubernur untuk salah satu provinsi maka jabatannya terbagi menjadi dua bagian yakni umum dan khusus. Jabatan bersifat umum terbagi menjadi dua bagian:

1. Pengangkatan dengan akad atas dasar sukarela.
2. Penguasaan atas dasar akad atas dasar terpaksa.<sup>84</sup>

Gubernur karena pengangkatan dengan akad atas dasar sukarela (gubernur mustakfi) mempunyai tugas tertentu dan otoritas tertentu pula. Pengangkatannya ialah imam (khalifah) menyerahkan kepemimpinan satu provinsi dan pengayoman seluruh rakyat yang ada didalamnya kepada seseorang.<sup>85</sup>

Ada beberapa ketentuan umum yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin Islam dan proses penyeleksiannya. Al-Mawardi menyebut dua bentuk seleksi; *pertama, Ahl-al-Ikhtiar*, atau mereka yang berwenang untuk memilih imam bagi umat. Mereka harus memenuhi tiga syarat:

- 1) adil;
- 2) memiliki ilmu pengetahuan yang memungkinkan mereka mengetahui siapa yang memenuhi syarat diangkat sebagai imam;
- 3) memiliki wawasan luas dan kearifan yang memungkinkan mereka memilih siapa yang paling tepat untuk menjadi imam, dan paling mampu dan pandai membuat kebijakan yang dapat mewujudkan kemaslahatan umat serta mampu mengelola kepentingan umat diantara mereka yang memenuhi syarat untuk

---

<sup>84</sup>Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Shultaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, terjemahan Fadli Bahri (Jakarta: PT. Darul Palah, 2013), h. 52.

<sup>85</sup>*Ibid*, h 53.

jabatan itu. *Kedua, Ahl-al-Imamah*, atau mereka yang berhak mengisi jabatan imam.

Di dalam Islam, gubernur tidak dipilih oleh rakyat. Tetapi diangkat oleh kepala negara (khalifah). Imam al Mawardi dalam kitabnya, membagi gubernur menjadi dua. Pertama, gubernur yang diangkat dengan kewenangan khusus. Kedua, gubernur dengan kewenangan secara umum mencakup seluruh perkara. Menurut Al Mawardi, syarat untuk menjadi gubernur tidak jauh berbeda dengan syarat yang ditetapkan untuk menjadi wakil khalifah (muawin tafwidh). Sementara Muawin syaratnya sama dengan syarat menjadi Khalifah. Jadi secara umum syarat menjadi gubernur sama dengan syarat menjadi kepala negara. Perbedaannya hanya pada kekuasaan gubernur lebih sempit dibandingkan kekuasaan muawin tafwidh.<sup>86</sup>

Adapun Syarat-syarat Kepala Daerah Dalam Islam Dalam kaidah hukum Islam, seseorang yang layak menjadi pemimpin setidaknya memiliki;

- a. kemampuan intelektual dan spiritual yang unggul;
- b. akhlak atau moralitas yang tinggi;
- c. kemampuan menjadi pelayan umat secara adil;
- d. amanah, jujur, dan *siddiq*. Seorang pemimpin bagi umat Islam merupakan pelayan yang harus mendahulukan kepentingan umatnya daripada kepentingan sendiri.<sup>87</sup>

Hal terpenting dalam melakukan sebuah pengangkatan adalah persyaratannya. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat dalam jumlah

---

<sup>86</sup>M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*(Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.225.

<sup>87</sup>Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam, Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani, Dan Demokrasi* (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2008), h. 62.

persyaratan ini al-Baghdadi menyebutkan jumlahnya sebanyak 4 syarat jumlah yang sama dikatakan juga oleh Ibnu Khaldun walaupun tidak ada kesesuaian dalam redaksi. Sementara Al-ghazali menyebutkannya sebanyak 10 syarat, dan menurut al-Mawardi sendiri sebanyak 7 syarat. Jika kita lihat pandangan para ulama dalam menentukan jumlah persyaratan, yang ada hanya perbedaan simbol belaka, tidak masuk pada substansi. Penyebabnya mungkin kembali pada singkat dan rincinya seorang ulama dalam menerangkan persyaratan.

Adapun mengenai persyaratan utama mereka memiliki persamaan:

1. Berilmu (kualifikasi ijtihad)

Imam al-haramain pernah berkata tentang ini, seperti yang sudah cukup diakui (*muttafaq alaih*). Sedangkan al-Ghazali menyebutnya sebagai hasil aklamasi para ulama (*mujma' alaihi*). Kemudian al-Ramli memperkuat pendapat sebelumnya dengan mengatakan, tetapi dihikeyatkan bahwa dalam hal ini ada ijma. Yang dimaksud oleh mereka dengan kualifikasi ijtihad itu adalah mempunyai ilmu syariat Islam dan hokum-hukumnya beserta sumber-sumber pengambilan hokum. Atau, pada masa sekarang, dikatakan harus mengetahui perundang-undangan Islam.

Sampai sejauh mana ilmu yang harus diketahui oleh seorang pemimpin disini? Al-Baghdadi menjawab, sedikitnya harus mencapai ukuran seorang mujtahid dalam menentukan halal dan haram serta hokum-hukum lainnya. Ibnu Khaldun berkata, tidak cukup ilmu saja, tetapi gharus mampu berijtihad karena taklid dalam hokum termasuk kategori lemah. Sementara seorang pemimpin harus sempurna dalam sifat maupun perilakunya

## 2. Mengetahui ilmu politik, perang, dan administrasi

Para ulama mengungkapkan tentang syarat mengetahui ilmu politik, perang, dan administrasi dengan redaksi yang berbeda-beda. Al-Baghdadi, misalnya, berkata, mengetahui bentuk perpolitikan dan baik dalam mengurus permasalahan, mengetahui tingkatan sosial manusia yang mampu berinteraksi dengan mereka. Tidak meminta pertolongan pada para pekerja kecil untuk mengerjakan tugas yang besar, dan harus benar-benar mengetahui ilmu peperangan. Sementara dalam bahasanya al-Mawardi adalah, seorang pemimpin harus mengetahui politik kepemimpinan dan mampu mengurus kemaslahatan Negara.

## 3. Kondisi jiwa dan raga baik

Berkenaan dengan yang disebut pertama, al-mawardi menyebutkan bahwa syarat ini harus terpenuhi, berani dan mampu menolong yang akan dapat dipakai dalam melindungi hal-hal yang penting dan jihad melawan musuh.

Imam al-haramain berkata, syarat-syarat dari seorang pemimpin adalah harus mampu menghadapi berbagai permasalahan dan mengantisipasinya dengan cepat, cekatan dalam mempersiapkan militer untuk menghadapi musuh dan mempunyai pandangan yang jernih bagi kepentingan rakyat. Dia tidak mengikuti hawa nafsu yang mengakibatkan ketidakjelasan dalam mengawasi kenegaraan, dan cukup keras memperjuangkan tegaknya hukum-hukum tuhan.

Sedangkan yang dimaksud dengan sehat badan adalah sehat panca indra dan anggota badan yang dapat mempengaruhi etos kerja. Definisi Ibnu

khaldun lebih luas lagi dari pada definisi para ulama fiqh dan ulama lainnya, yang menyebutkan persyaratan ini berhubungan dengan persyaratan kepemimpinan. Ilmu khaldun berkata, selamat panca indra dan badan dari kelemahan yang mengakibatkan hilangnya efektifitas kerja, seperti gila, tidak mendengar, tidak melihat, tidak dapat bicara, atau hilangnya salah satu anggota badan, seperti, hilangnya tangan, kaki.

#### 4. Berlaku adil dan berakhlak mulia

Berlaku adial dan berakhlak mulia dalam pandangan ulama fiqh identik dengan makna takwa. Kemudian para ulama menambah kata wara' yang muatannya harus terelisasikan dalam jiwa seorang pemimpin. Sebagian ulama fiqh melihat persyaratan ini lebih cocok dengan menggunakan kata wara' al-mawardi memberikan pendapat tentang persyaratan ini dengan mengatakan para pemimpin dikenai persyaratan sebanyak 7 syarat, sebagai yang kita ketahui, yaitu diantaranya, berlaku adil dengan sekian persyaratan yang bersifat integral. Bagian ini dianggapnya sebagai syarat pertama yang telah dijelaskan oleh al-mawardi dalam bukunya, *al ahkamus sulthaniyah*, bab qadha yang bunyinya, berlaku adil harus benar apa-apa yang diucapkannya dapat dipercaya dan menjahui perbuatan dosa, tidak memunculkan keraguan. Selain itu, juga selalu mencari keridhaan dan menahan timbulnya kemarahan, dapat dijadikan contoh bagi agamanya dan dunianya. Berarti seorang pemimpin bukan saja dilarang melakukan yang diharamkan oleh hukum, melainkan juga harus menjahui permasalahan yang masih belum jelas hukumnya.



5. Memiliki kualifikasi kepemimpinan yang penuh.

Syarat berikutnya meliputi beberapa syarat. Dia harus seorang muslim, bebas, laki-laki, dan berakal. Dengan memenuhi persyaratan tersebut, seseorang dapat dikatakan memiliki kualifikasi kepemimpinan yang penuh. Sebagian ulama tidak menyinggung persyaratan tersebut karena hal itu telah dapat dipahami jika dalam kekuasaan yang cakupannya kecil di syartkan harus dari orang yang memiliki kualifikasi kepemimpinan penuh, mengapa tidak di syartkan dalam bentuk kekuasaan yang lebih besar lagi, yang notabene diantaranya adalah kekuasaan imam.

6. Keturunan

Seorang harus berasal dari keturunan quraisy. Persyaratan sebelumnya secara keseluruhan telah disepakati keberadaannya. Namun, dalam syarat yang satu ini, para ulama berbeda pendapat.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup>*Ibid*, h. 72.

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM KELURAHAN FAJAR BULAN KECAMATAN WAY TENONG KABUPATEN LAMPUNG BARAT DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

### **A. Profil Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat**

#### **1. Letak Geografis**

Fajar Bulan adalah sebuah Kelurahan di Kecamatan Way Tenong kabupaten Lampung Barat. Asal mulanya Fajar Bulan terbentuk oleh perantau dari Jawa dan daerah lainnya. Fajar Bulan merupakan pusat dari perekonomian Kecamatan Way Tenong, jarak ke Ibu Kota Kabupaten ± 185, 48 dan termasuk daerah pegunungan. Fajar Bulan mempunyai lingkungan yaitu Mulya Indah, Suka Mulya, Mulya Sari, Wangun Sari, Wangun Reja, Wangun Jaya, Sinar Jaya, Mekar Jaya, Kalireja 1, Kali Reja 2, Suka Maju 1, Suka Maju 2.<sup>89</sup>

Kelurahan Fajar Bulan beralih status dari Desa menjadi Kelurahan Fajar Bulan pada tahun 2004. Pada perkembangannya Fajar Bulan saat ini dipimpin oleh Lurah yaitu Bapak Iwan Darmawan, S.Kom. Kelurahan Fajar Bulan memiliki hasil alam berupa kopi, pisang, lada dan cengkeh.

Fajar Bulan terdapat berbagai etnis suku yang berbeda-beda seperti Jawa, Sunda, Semendo, padang dan Lampung. Mata pencarian penduduk yang berbeda-beda.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup>Dokumentasi Profil Kelurahan Fajar Bulan.

<sup>90</sup>Iwan Dermawan, Wawancara Lurah Kelurahan Fajar Bulan, 8 November 2018.

Kelurahan Pajar Bulan merupakan satu - satunya kelurahan yang berada di Kecamatan Way Tenong dari waktu ke waktu mengalami perkembangan ekonomi dan jasa yang sangat pesat.

a. Batas-batas wilayah

Batas wilayah digunakan untuk mengatur dan menandai luas cakupan suatu wilayah daerah tersebut atau pemisah antara daerah satu dengan daerah lain. Berikut adalah tabel batas wilayah Fajar Bulan:

**Tabel I**  
**Batas-Batas Wilayah Fajar Bulan**

Batas wilayah	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Suka Jaya	Sumber Jaya
Sebelah Selatan	Karang Agung	Way Tenong
Sebelah Timur	Semarang Jaya	Air Hitam
Sebelah Barat	Puralaksana	Way Tenong

Sumber: Dokumentasi Profil Kelurahan Fajar Bulan

Tabel tersebut menunjukan bahwa Kelurahan Fajar Bulan berbatasan langsung dengan Desa lain seperti Suka Jaya, Karang Agung, Semarang Jaya dan Puralaksana serta Kecamatan lain yaitu Sumber Jaya, Way Tenong dan Air Hitam.

Luas wilayah Kelurahan Fajar Bulan adalah **540,109** Ha yang pemanfaatannya berupa :

**Tabel II**

**Luas Areal**

<b>Luas areal</b>	<b>Ha</b>
Pemukiman	229,830
Persawahan	42,694Ha
Perkebunan	70,776
Kuburan	17,500
Prasarana umum lainnya	79,109

Sumber: Dokumentasi Profil Kelurahan Fajar Bulan

Melihat komposisi pemanfaatan lahan, yang paling besar adalah untuk lahan pemukiman dan prasarana umum, hal ini menunjukkan bahwa Kelurahan Fajar Bulan memiliki potensi dan dinamika sosial budaya, ekonomi yang cukup besar. Luas persawahan yang masih ada juga masih potensial baik untuk pengembangan perekonomian sektor pertanian maupun industri. Kondisi ini didukung letak Kelurahan Fajar Bulan yang cukup strategis, yaitu berada di dekat pusat pemerintahan kecamatan maupun kabupaten.

**b. Iklim Fajar Bulan**

Iklim adalah suatu kondisi rata-rata untuk suatu daerah. Berikut adalah iklim di Kelurahan Fajar Bulan:

**Tabel III**

**Iklim Fajar Bulan**

<b>Iklim</b>	<b>Jumlah</b>
Curah hujan	7,00 mm
Jumlah curah hujan	7,00 bulan
Kelembapan	-
Suhu rata-rata harian	38,00 °c
Tinggi tempat dari permukaan laut	820,0 mdl

Sumber: Dokumentasi Profil Kelurahan Fajar Bulan

Iklim Fajar Bulan sama halnya dengan Desa-Desa yang lain yaitu mempunyai iklim kemarau dan penghujan.<sup>91</sup>

**c. Jenis dan Kesuburan Tanah**

Kelurahan Fajar Bulan merupakan daerah pegunungan, Berikut jenis dan kesuburan tanah Kelurahan Fajar Bulan.

**Tabel IV**

**Jenis dan Kesuburan Tanah**

Warna Tanah (Sebagian Besar)	Coklat Kehitaman
Tekstur Tanah	Gambut
Tingkat Kemiringan Tanah	15,00 Derajat
Lahan Kritis	-
Lahan Terlantar	-

Sumber: Dokumentasi Profil Kelurahan Fajar Bulan

---

<sup>91</sup> Dokumentasi Kelurahan Fajar Bulan Tahun 2015.



d. Kependudukan

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili disuatu tempat dan menetap. Berikut adalah jumlah penduduk di Kelurahan Fajar Bulan berdasarkan lingkungan, pekerjaan dan pendidikan:

1. Berdasarkan Dusun/Lingkungan

Dusun atau lingkungan adalah bagian dari sebuah Desa atau Kelurahan, karena dalam susunannya suatu Desa atau Kelurahan terdiri dari beberapa Dusun atau lingkungan. Berikut jumlah kependudukan berdasarkan Dusun atau Lingkungan di Kelurahan Fajar Bulan:

Kelurahan Pajar Bulan terdiri dari 12 (dua belas) wilayah lingkungan yaitu:

**TabelV**

**Nama Lingkungan Di Kelurahan Fajar Bulan**

No	Nama lingkungan	Jumlah RT
1	Mulya Indah	02 RT
2	Suka Mulya	01 RT
3	Mulya Sari	02 RT
4	Wangun Sari	01 RT
5	Wangun Reja	02 RT
6	Wangun Jaya	01 RT

7	Sinar Jaya	02 RT
8	Mekar Jaya	02 RT
9	Kalireja I	02 RT
10	Kalireja II	02 RT
11	Sukamaju I	02 RT
12	Sukamaju II	02 RT

Sumber: Dokumentasi Profil Kelurahan Fajar Bulan

Pertumbuhan penduduk di Kelurahan Pajar Bulan mencapai 0,8 % per tahun. Jumlah penduduk Kelurahan Pajar Bulan sampai dengan Bulan Agustus 2010 sebanyak 2.052 KK atau 7.866 jiwa yang terdiri dari :

- Penduduk Laki-laki sebanyak 4.053 jiwa
- Penduduk Perempuan sebanyak 3.813 jiwa

## 2. Berdasarkan pendidikan

Pendidikan adalah salah satu indikator yang sangat penting dalam kehidupan Masyarakat Kelurahan Fajar Bulan tingkat pendidikan nya beragam. Berikut jumlah penduduk berdasarkan pendidikan di Kelurahan Fajar bulan.

**Tabel VI**

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	LULUSAN	JUMLAH
1	SD	760 Orang
2	SLTP	1160 Orang
3	SMA	873 Orang
4	DIPLOMA/SEDERAJAD	140 Orang
5	SARJANA	50 Orang

Sumber: Dokumentasi Profil Kelurahan Fajar Bulan

3. Berdasarkan pekerjaan

**Tabel VII**

**Berdasarkan Kegiatan Atau Aktivitas Masyarakat**

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Sektor Pertanian	2795 Orang
2	Sektor Peternakan	-
3	Sektor Industri Kecil dan Menengah	267 Orang
4	Pemerintahan PNS/TNI Pol	50 Orang
5	Pegawai Swasta	230 Orang
6	Jasa Perdagangan	37 Orang
7	Jasa Ketrampilan	-
8	Pensiunan TNI/Polri/PNS	5 Orang
9	Jasa lembaga keuangan	-
10	Jasa angkutan /transportasi	-

11	Jasa pelayanan hukum	-
12	Jasa lainnya	177 Orang

Sumber: Dokumentasi Profil Pekon dan Kelurahan Fajar Bulan

#### 4. Berdasarkan usia dan jenis kelamin

**Tabel VIII**

#### **Berdasarkan Golongan usia dan jenis kelamin**

No	Golongan usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Penduduk Usia 0 –06 th	891 Orang	1450 Orang	2341 Orang
2	Masih Sekolah 7-18 th	308 Orang	450 Orang	758 Orang
3	Penduduk Usia 18 – 56 th Yang bekerja	1500 Orang	1050 Orang	2550 Orang
4	Penduduk Usia 18 – 56 th Yang Belum Bekerja	-	-	-
5	Penduduk Usia 56 Th keatas	874 Orang	1170 Orang	2044 Orang
6	Angkatan Kerja	50 Orang	62 Orang	112 Orang

Sumber: Dokumentasi Profil Kelurahan Fajar Bulan

#### e. Sarana Umum Kelurahan Fajar Bulan

Sarana umum adalah suatu fasilitas yang dapat digunakan oleh masyarakat. Berikut adalah sarana umum di Kelurahan Fajar Bulan:

**Tabel IX**

**Sarana Umum Kelurahan Fajar Bulan**

No	Jenis Sarana	Jumlah
1.	Mushola	18
2.	Masjid	7
3.	Pondok pesantren	2
4.	TK	3
5.	PAUD	2
6.	Sekolah Dasar	4
7.	SMP	1
8.	SMA/SMK	1
9.	Balai kampung	1
10.	Lapangan olah raga	6
<b>Jumlah</b>		<b>40</b>

Sumber: Dokumentasi Profil Kelurahan Fajar Bulan.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dan masyarakat sadar dalam menjaga, membangun dan memelihara fasilitas umum dalam bidang keagamaan, pendidikan dan kesehatan.

**B. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kelurahan Fajar Bulan**

Pemilihan Umum Bupati Lampung Barat diselenggarakan pada tanggal 15 Februari 2017 untuk memilih Bupati Lampung Barat periode 2017-2022. Terdapat dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang mendaftar pada

Pemilihan Bupati Serentak 2017. Adapun calon yang mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati periode 2017-2022 untuk ikut pada pemilihan bupati 2017 yaitu, Bpk. Parosil Mabsus mencalonkan diri bersama wakilnya Bpk. Mad Hasnurin dengan didukung/diusung oleh beberapa partai politik seperti: PDIP, PAN, dan Golkar. Selain itu ada Bpk. Edy Irawan Arief, juga turut mencalonkan diri menjadi Bupati dan didampingi oleh wakilnya yaitu Bpk. Ulul Azmi Soltiansa. Pasangan Bpk. Edy Irawan Arief dan Bpk. Ulul Azmi Soltiansa juga didukung/diusung oleh beberapa partai politik seperti: Nasdem, PKS, PPP, PKB, Demokrat, dan Gerindra.

Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat periode 2017-2022 tersebut jumlah mata pilih di kelurahan Fajar Bulan yaitu berjumlah 5981 jiwa. Yang terdiri dari jumlah perempuan dan jumlah laki-laki. Dan tiap-tiap lingkungan yang berada di kelurahan Fajar Bulan tersedia TPS atau Tempat Pemungutan Suara. Adapun jumlah TPS yang berada di kelurahan Fajar Bulan yaitu berjumlah 14 TPS.

**Tabel X**

**HASIL PILKADA TAHUN 2017 KELURAHAN FAJAR BULAN  
KECAMATAN WAY TENONG KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

NO	LINGKUNGAN	TPS	Jumlah Mata Pilih	Jumlah Pemilih	NO. 1	%	NO. 2	%
1	MULYA INDAH	1	316	265	206	77,74	59	22,26
2	SUKA MULYA	2	533	442	318	71,95	124	28,26
3	MULYA SARI	3	365	289	145	50,14	144	49,83
		4	377	315	141	44,76	174	55,24



4	WANGUN SARI	5	485	369	238	64,50	131	35,50
5	WANGUN REJA	6	389	308	153	49,68	155	50,32
		7	319	258	128	49,61	130	50,39
6	MEKAR JAYA	8	570	411	253	61,56	158	38,44
7	WANGUN REJA	9	342	280	131	46,79	149	53,21
8	SINAR JAYA	10	413	311	91	29,26	220	70,74
9	KALI REJA I	11	510	385	220	57,14	165	42,86
10	KALI REJA II	12	395	297	186	62,63	111	37,37
11	SUKAMAJU I	13	563	411	303	73,72	108	26,28
12	SUKAMAJU II	14	404	299	254	84,95	45	15,05
<b>JUMLAH</b>			<b>5981</b>	<b>4640</b>	<b>2767</b>	<b>59,63</b>	<b>1873</b>	<b>40,37</b>

Sumber: Dokumentasi Profil Kelurahan Fajar Bulan.

Mengenai tingkat partisipasi politik masyarakat kelurahan Fajar Bulan sangat erat kaitan nya dengan bagaimana sosialisasi politik itu dilakukan dimana dengan adanya sosialisasi politik yang baik mampu membangun kesadaran politik masyarakat, namun dari tabel di atas dijelaskan bahwasannya partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah di Kelurahan Fajar Bulan masih ada masyarakat yang tidak ikut serta dalam pelaksanaan pesta demokrasi tersebut, sehingga partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak suara masih terlihat kurang atau tingkat kesadaran diri dari masyarakat masih kurang. Terlebih jika di lihat dari sosialisasi politik yang diselenggarakan oleh panitia pemilu terlihat masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan kepala daerah atau pemilu lainnya, hal ini yang menjadi

alasan masyarakat lebih mementingkan kepentingan pribadinya dibandingkan kepentingan umum.

### **C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kurangnya Partisipasi Masyarakat Kelurahan Fajar Bulan**

#### **1. Faktor pekerjaan**

Jika di lihat dari bentuk mata pencaharian masyarakat kelurahan Fajar Bulan yang berbeda-bedabahasannya sebagian besar masyarakat berkerja sebagai petani sehingga lebih banyak yang menghabiskan waktu di luar rumah seperti keladang berdagang berkebun dan sebagainya. Padahal dalam pelaksanaan pemilu atau pesta rakyat yang diselenggarakan seharusnya masyarakat dapat menyampaikan aspirasi politiknya dengan ikut serta menyampaikan suara dan hak pilihnya. Dengan hak aktif warga Negara memperoleh kesempatan yang sama untuk ikut serta aktif dalam mengatur dan menyelenggarakan Negara salah satunya dengan turut serta berpartisipasi dalam pemilu, sedangkan hak pasif seorang warga Negara ini biasanya dipilih, ditunjuk, ataupun diangkat untuk menjalankan tugas-tugas kenegaraan.

Mengenai masih adanya masyarakat yang tidak mau datang ke TPS atau tidak mau ikut serta dalam pemilihan kepala daerah Bapak Iwan Darmawan, S.Kom selaku Lurah di kelurahan Fajar Bulan dalam wawancaranya menjelaskan.

*“Terkait kurangnya partisipasi masyarakat Kelurahan Fajar Bulan di pengaruhi bermacam-macam faktor, salah satunya yaitu didasari faktor*

*ekonomi hal ini terlihat karena perbedaan mata pencaharian, masyarakat ada yang berdagang, berkebun dll. Sehingga pada saat pemungutan suara masyarakat sedang sibuk bekerja, contoh pedagang dipasar, pasar yang berada di kelurahan fajar bulan buka dari pukul 05.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB sedangkan TPS pada saat pemilihan kepala daerah atau pemilu di selenggarakan pukul 08.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB sehingga menurut mereka waktunya tanggung untuk pulang terlebih jika mereka berdagang diluar kecamatan sehingga membutuhkan waktu untuk mereka pulang dulu”.*<sup>92</sup>

Selain alasan-alasan yang telah dijelaskan diatas ada pula beberapa alasan lain yang menyebabkan masyarakat kelurahan Fajar Bulan kurang berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah Tahun 2017 yakni seperti yang telah dijelaskan oleh tokoh agama bapak Ust. Andi Lala dalam wawancaranya.

*“Biasanya masyarakat disini yang tidak ikut memilih atau datang ke TPS mereka sedang di gunung untuk mengurus kebun kopi sehingga mereka enggan untuk pulang terlebih jarak antara rumah dan gunung cukup jauh jadi menurut mereka lebih baik menyelesaikan pekerjaan di kebun dibandingkan pulang hanya untuk memilih”.*<sup>93</sup>

## 2. Faktor kesadaran masyarakat

faktor lain yang mempengaruhi kurangnya partisipasi masyarakat yaitu, dikarenakan belum adanya fasilitas pendidikan seperti perguruan tinggi di daerah tersebut sehingga mengharuskan pemuda/pemudi yang ingin melanjutkan pendidikannya pergi keluar daerah. Maka dari itu karena jauhnya jarak untuk pulang kekampung mempengaruhi tingkat kesadaran akan hak politik dan suara mereka, pemuda/pemudi lebih memilih tidak menggunakan hak suaranya (golput) dari hal tersebut

---

<sup>92</sup>Iwan Darmawan, wawancara dengan penulis, Kelurahan Fajar Bulan, 8 November 2018.

<sup>93</sup>Andi Lala, wawancara dengan penulis, Kelurahan Fajar Bulan, 10 November 2018.

berpengaruh pada kesadaran dan juga menjadi alasan untuk tidak ikut sertanya masyarakat maupun pemuda/pemudi pada pemilihan kepala daerah yang berlangsung. Hal ini disampaikan oleh Bpk. Syarif Hidayat dalam wawancaranya.

*“Banyak juga di Kelurahan Fajar Bulan ini pemuda yang pergi keluar daerah untuk kuliah apalagi sekarang ini sudah banyak orang tua yang sadar akan pendidikan dan mereka menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, tetapi biasanya mereka yang sedang kuliah atau berada diluar daerah mereka malas untuk pulang hanya sekedar untuk memilih saja dengan alasan jarak yang jauh”<sup>94</sup>*

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas kurangnya partisipasi politik tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak suaranya.

### 3. Sosialisasi politik

Disetiap akan dilaksanakan pilkada ataupun pemilu legislatif panitia PPS (Panitia Pemungutan Suara) selalu memberikan pemahaman ataupun sosialisasi kepada masyarakat agar ikut serta dalam pemilihan umum yang salahsatunya dengan cara memberikan surat pilih. Hal ini seperti yang dikatakan oleh anggota PPS kelurahan Fajar Bulan yaitu Bpk.Salmi.

*“Iya sudah, kami sebagai panitia PPS setiap akan ada pemilu ataupun pilkada selalu mengecek atau mendata ulang pemilih dengan mendatangi langsung ke tiap-tiap rumah warga, disitu kami juga memberikan pengetahuan kepada masyarakat, sesudah itu disetiap kami membagikan surat pilih kepada warga kami selalu mengingatkan dan mengajak warga untuk memilih di TPS yang sesuai dengan tempat tinggal masing-masing”<sup>95</sup>*

Selain melalui proses pengecekan dan pendataan ulang serta pemberian pemahaman kepada masyarakat Kelurahan Fajar Bulan, proses pemilihan kepala daerah terlaksana dengan baik meskipun dalam

---

<sup>94</sup>Syarif Hidayat, wawancara dengan penulis, Kelurahan Fajar Bulan, 8 November 2018.

<sup>95</sup>Bapak Salmi, wawancara dengan penulis, Kelurahan Fajar Bulan, 10 November 2018.

pelaksanaanya masih ada masyarakat yang tidak mau berpartisipasi untuk datang ke TPS. Seperti di jelaskan oleh Bapak Wawan selaku ketua PPS pada pemilihan kepala daerah 2017 di kelurahan Fajar bulan.

*“Iya, pada pelaksanaan pemilihan bupati tahun 2017 kemarin Alhamdulillah berjalan dengan lancar karena memang di setiap pemilu legislatif ataupun kepala daerah dikelurahan fajar bulan ini tidak pernah ada keributan, walaupun jika dilihat dari partisipasi masyarakatnya masih ada yang tidak ikut memilih ya kami sebagai panitia pemungutan suara bersyukur karna pelaksanaannya selalu berjalan dengan baik dengan harapan pada pilkada selanjutnya masyarakat bisa lebih sadar untuk ikut dalam pemilihan”.*<sup>96</sup>

Maka dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat kelurahan Fajar Bulan dalam menggunakan hak suara pada pilkada tahun 2017 yaitu disebabkan karena faktor ekonomi dan faktor kurangnya kesadaran dari masyarakat.

---

<sup>96</sup>Wawan, wawancara dengan penulis, Kelurahan Fajar Bulan, 8 November 2018.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

#### **A. Faktor Kurangnya Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Hak Pilihnya Pada Pemilihan Bupati Lampung Barat**

Pemilihan umum dan demokrasi adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk menggunakan hak politiknya, terjaminnya pergantian kepemimpinan secara regular dan damai, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat serta mempertahankan kedaulatan rakyat dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu indikator yang paling mendasar dari keberhasilan dan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan pemilu yang demokratis adanya keterlibatan masyarakat secara aktif.

Partisipasi politik merupakan suatu mekanisme yang penting dalam suatu negara, kesadaran politik warga negara dalam hal ikut serta dalam proses pengangkatan kepala daerah merupakan faktor yang sangat mendasar. Artinya masyarakat harus mengerti pentingnya ikut partisipasi, dan masyarakat diharuskan memahami akan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik.

Partisipasi politik merupakan suatu kegiatan yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut seperti tingkat pendidikan, tingkat kehidupan, ekonomi, dan fasilitas-fasilitas yang memungkinkan berlangsungnya partisipasi politik. Salah satu fasilitas yang dapat



memungkinkan berlangsungnya partisipasi politik adalah adanya suatu sistem komunikasi yang lancar dalam masyarakat dan sistem politik.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat yang berada di Kelurahan Fajar Bulan dalam kegiatan politik khususnya dalam menggunakan hak pilihnya. Adapun faktor-faktor tersebut yaitu faktor ekonomi, dan kesadaran masyarakat.

Faktor ekonomi, karena tuntutan kebutuhan yang semakin hari semakin meningkat membuat masyarakat di Kelurahan Fajar Bulan harus senantiasa membanting tulang untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Karena memang mata pencaharian masyarakat kelurahan fajar bulan berbeda-beda yaitu ada yang berdagang, berkebun dan lain sebagainya. Oleh karena itu mereka hanya menghabiskan hari-harinya untuk bekerja. Dan mereka cenderung mengesampingkan aktifitas sosial atau kegiatan yang bersifat tidak menghasilkan apa-apa untuk mereka serta kegiatan yang sifatnya tidak ada hasil untuk mereka memenuhi kebutuhannya.

Faktor kesadaran masyarakat, dengan rasa kurang percaya nya masyarakat Kelurahan Fajar Bulan terhadap pemerintah membuat masyarakat menjadi acuh atau kurang minat terhadap aktifitas sosial. Mereka beranggapan suara mereka atau aspirasi mereka tidak dapat merubah keadaan menjadi lebih baik, mereka lebih memilih mencari kegiatan lain yang dapat bermanfaat untuk dirinya sendiri. Padahal dengan adanya pilkada atau pemilu mereka dapat menyampaikan aspirasi mereka untuk kehidupan yang lebih baik dan dapat menjadikan sistem pemerintahan yang adil dan makmur.

## **B. Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Hak Pilihnya Pada Pemilihan Bupati Lampung Barat Ditinjau Dari Fiqh Siyasah**

Partisipasi politik merupakan suatu pemberian amanat terhadap calon yang dipercaya yang sesuai dengan nilai-nilai Islami. Partisipasi politik juga diartikan sebagai keterlibatan individu maupun organisasi politik dalam mengambil keputusan yang terkait dengan kemaslahatan umum diinstitusi politik formal maupun informal, ditingkat nasional maupun daerah berserta seluruh aktifitasnya seperti pemilihan umum, koalisi, dan aktifitas lainnya dengan menyuarakan kebaikan dan meminimalisir keputusan yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Menurut Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 58 bahwa Allah telah memerintahkan manusia untuk berperan aktif atau ikut serta dalam kegiatan politik baik secara langsung maupun tidak langsung.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”(Q.S. An-Nisa ayat. 58).

Berdasarkan ayat diatas keikutsertaan masyarakat dalam memberikan hak suara pada pilkada merupakan suatu kegiatan politik atau pemberian amanat serta memberikan kepercayaan kepada calon pemimpin.

Partisipasi politik juga diartikan sebagai keterlibatan individu maupun organisasi politik dalam mengambil keputusan yang terkait dengan kemaslahatan umum diinstitusi politik formal maupun informal, ditingkat nasional maupun daerah beserta seluruh aktifitasnya seperti pemilihan umum, koalisi, dan aktifitas lainnya dengan menyuarakan kebaikan dan meminimalisir keputusan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa memilih pemimpin atau ikut serta dalam pilkada adalah suatu keharusan atau suatu kewajiban. Dan mereka berfatwa bahwa tindakan golput atau tidak ikut serta dalam pilkada itu haram. Allah memerintahkan segala urusan diputuskan dengan cara musyawarah.

Dengan demikian partisipasi politik dalam Islam tidak lepas menggunakan prinsip musyawarah dimana di dalam Islam dikenal dengan istilah *syura'* yang berasal dari kata *syawara yusyawiru* yang berarti menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu. Jadi, *syura'* atau musyawarah dapat diartikan yaitu saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat.

Jika dilihat dari sikap dan tindakan masyarakat Kelurahan Fajar Bulan yang masih kurang ikut serta dalam pilkada bertentangan dengan perintah Allah atau bertentangan dengan ajaran Islam yang mengharuskan manusia untuk ikut serta dalam pemilihan pemimpin. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup seorang diri, kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam akan menuntutnya agar senantiasa berinteraksi dengan manusia lain.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

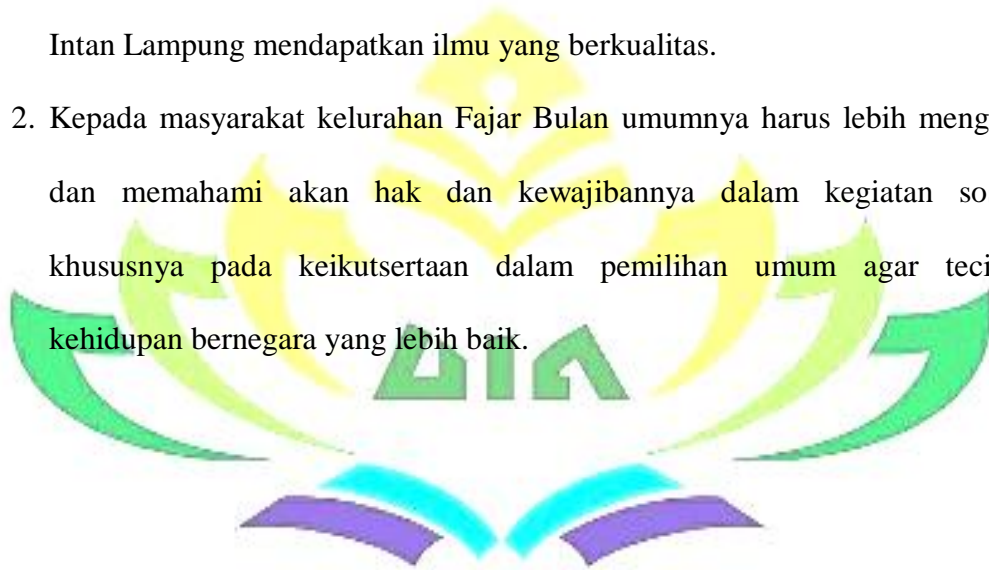
Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab terakhir ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberian hak pilih pada pilkada diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 68 tentang pemerintahan daerah: Setiap warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. Namun dalam prakteknya masih ada masyarakat Kelurahan Fajar Bulan yang masih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan sosial. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat yang berada di Kelurahan Fajar Bulan dalam kegiatan politik khususnya dalam menggunakan hak pilihnya. Adapun faktor-faktor tersebut yaitu faktor ekonomi, dan faktor kesadaran masyarakat
2. Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat: 58 bahwa Allah telah memerintahkan manusia untuk berperan aktif atau ikut serta dalam kegiatan politik baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian partisipasi politik dalam Islam tidak lepas menggunakan prinsip musyawarah dimana di dalam Islam dikenal dengan istilah *syura*'. Sikap dan tindakan masyarakat Kelurahan Fajar Bulan yang masih kurang ikut serta dalam pilkada bertentangan dengan perintah Allah atau bertentangan dengan ajaran Islam yang mengharuskan manusia untuk ikut serta dalam pemilihan pemimpin.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya dalam proses perkuliahan mata kuliah fiqh siyasah maupun mata kuliah lainnya lebih ditekankan substansi materinya dan pembelajarannya juga ditingkatkan agar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung mendapatkan ilmu yang berkualitas.
2. Kepada masyarakat kelurahan Fajar Bulan umumnya harus lebih mengerti dan memahami akan hak dan kewajibannya dalam kegiatan sosial khususnya pada keikutsertaan dalam pemilihan umum agar tercipta kehidupan bernegara yang lebih baik.



## DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Sahid Gantara Fh, M.Si, Moh. Dzulkiah Said, M.Si, *Sosiologi Politik "Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian"*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Abdul Mun'im Salim, *Fiqh Siyasah: konsepsi kekuasaan politik dalam Al - Qur'an*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Ahmad Sahal Hasan, "Partisipasi Politik" (On-Line), tersedia di: <http://www.dakwatuna.com/2014/03/20/48095/partisipasi-politik/amp/> (24 Januari 2018).
- Ali As-salus, *Imamah & Khilafah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- A.Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2012.
- Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Rawajawi Pers, 2013.
- Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 1997.
- Cholid Narbuto, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia "Edisi Revisi"* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011
- Din Syamsuddin, *etika agama dalam membangun masyarakat madani*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2000.
- Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia)*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2007.
- Etta Mamang Sangaji, *Metode Penelitian Pendekatan Praktik dalam Penelitian*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010.
- Efriza, *Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Poltik*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012.
- Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, Jakarta: Amzah, 2005.
- Gunawan Suswanto, *Mengawal Penegak Demokrasi*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2016.



Haw Widjaja, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Hepi Riza Zen, "Politik Uang Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Syariah" (On-Line), tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id> (22 Desember 2018)

Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Shultaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT. Darul Palah, 2013

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Kostitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Juliansyah, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2010.

Khairudin Tahmid, *Netralitas Lembaga Peradilan Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah*, Jurnal Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, Fakta Press, 2008.

M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

M. Noor Aziz, *Pengkajian Hukum tentang Pemilihan Kepala Daerah*, jurnal Perpustakaan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional. Tahun 2011.

Michael Rush, Philip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2001.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam"*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2014.

Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008.

Ni'matul Huda, *Hukum Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010 *Tata Negara "Edisi Revisi"*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007.

Rozali Abdullah, *mewujudkan pemilu yang lebih berkuaitas (pemilu legislatif)*, Jakarta: PT.raja grafindo persada, 2009.

Saefudin al-Amidi, *al-ihkam fi Ushul al-Ahkam*, jilid 3, Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983.

Samsul Munir Amin, *“Sejarah Peradaban Islam”* , Jakarta: Amzah, Cet. Ke-3, 2013.

Sayyid Muhammad Musa, *Al-Ijtihad Wa Mada Hajatina Ilaihfi Haza Al-Ashr*, Mishar: Dar Al-Kutub Al-Hadisah, 1973.

Shaban, Sejarah Islam *“Penfsiran Baru”* , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2007.

Sukses Gubernur Dan Wakil Gubernur Dalam Fiqh Siyasah” (On-Line), Tersedia di: <http://digilib.uinsby.ac.id/966/5/Bab%202.pdf> (10 oktober 2018).

Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasi, dan Civil Societ*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Susiadi AS, *metodologi penelitian*, Bandar Lampung: 2015.

Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam, Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani, Dan Demokrasi*, Yogyakarta: pustaka pelajar, 2008.

Tiyas Ayu Yulinda, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Partisiapsi Politik Masyarakat Desa Pampang Tangguk Jaya”*, Skripsi Program Sarjana Siyasah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Intan Lampung 2016.

Undang-Undang tentang pemerintah daerah, Undang-Undang No.23 Tahun 2014, pasal 1 ayat (2).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, pasal 43.